



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**ANALISIS REVIU LAPORAN KEUANGAN PKMERINTAH
DAERAH SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI
DALAM NEGERI NO. 4 TAHUN 2008 (STUDI KASUS PADA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)**

SKRIPSI



**MEDIA PURNAMA
0810535218**

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-NYA kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Analisis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2008 (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota)"**.

Selama proses pembuatan ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Orang tua yang telah memberi dorongan, semangat serta do'anya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Syafruddin Karimi, SE, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
3. Bapak Dr. H. Yuskar, SE, MA, Ak, selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang.
4. Ibu Dra.Sri Dewi Edmawati, M.Si, Akt selaku Ketua Program Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Universitas Andalas.Padang.
5. Bapak Drs, Edi Herman, MBA, Akt selaku pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan bantuan berupa petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen/staf pengajar pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas Padang, karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Program Ekstensi Universitas Andalas, dan segenap civitas akademika yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di kampus ini.
7. Dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Dengan segala keterbatasan yang penulis miliki, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, seperti kata pepatah “Tak ada gading yang tak retak”. Segala bentuk kritikan dan saran-saran untuk kesempurnaan skripsi ini penulis terima dengan lapang dada dan penuh rasa hormat. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan bagi yang membacanya. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Maret 2011

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR LAMPIRAN..... vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Reviu Laporan Keuangan Pemda	10
2.1.1 Dasar Hukum Reviu Laporan Keuangan Pemda ..	10
2.1.2 Pengertian Reviu Laporan Keuangan Pemda	11
2.1.3 Tujuan Reviu Laporan Keuangan Pemda	14
2.1.4 Ruang Lingkup Reviu Laporan Keuangan Pemda ..	14
2.1.5 Sasaran Reviu Laporan Keuangan Pemda	15
2.1.6 Konsep Dasar Reviu Laporan Keuangan Pemda ..	15
2.2 Tahapan Reviu Laporan Keuangan Pemda	16
2.2.1 Perencanaan Reviu Laporan Keuangan	16
2.2.1.1 Pemahaman Atas Entitas	16
2.2.1.2 Penilaian Atas SPI	17
2.2.1.3 Penyusunan Program Kerja Reviu	21
2.2.2 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan	22
2.2.2.1 Penelusuran Angka	22

2.2.2.2 Permintaan Keterangan	23
2.2.2.3 Prosedur Analitis	25
2.2.2.4 Kertas Kerja Reviu	26
2.2.3 Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	28
2.3 Bentuk dan Isi Hasil Laporan Reviu	28
2.3.1 Penulisan Laporan	30
2.3.2 Mekanisme Pelaporan	31
2.4 Pengertian Laporan dan Tujuan Laporan Keuangan	32
2.4.1 Pengertian Laporan Keuangan	32
2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan	32
2.5 Komponen-Komponen Laporan Keuangan	34
2.5.1 Neraca	37
2.5.2 Laporan Realisasi Anggaran	39
2.5.3 Laporan Arus Kas	41
2.5.4 Catatan Atas Laporan Keuangan	41

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian	42
3.2 Objek penelitian	42
3.3 Jenis dan Sumber Data	42
3.4 Metode Pengumpulan Data	43
3.5 Metode Analisis	44

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

4.1 Fungsi Eselon II, Eselon III, Eselon IV, Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota	45
4.2 Struktur Organisasi Inspektorat Padang Pariaman	55

BAB V PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Reviu Laporan Keuangan Pada Pemda	
--	--

Kabupaten Lima Puluh Kota	56
5.1.1 Perencanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	56
5.1.2 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	58
5.1.3 Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Keuangan	59
5.2 Opini BPK dan Temuannya	61
5.2 Analisa Reviu Laporan Keuangan Pemda Kabupaten Padang Pariaman	63
5.3 Kendala-kendala dalam Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota	68
BAB VI PENUTUP	
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar Struktur Organisasi Inspektorat	61
--	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

Laporan Hasil Reviu Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2009 ...

Laporan Keuangan Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2009
sebelum reviu.....

Laporan Keuangan Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA Tahun 2009 setelah
di Audit BPK

Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pemda KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA Tahun 2009 oleh BPK RI

Surat Setoran Pajak (SSP) Kantor Satpol-PP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
bulan Mei Tahun 2009

Buku Kas Umum (BKU) Kantor Satpol-PP KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Tahun 2009



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Era globalisasi saat ini merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh seluruh masyarakat dunia. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). *World Bank* dalam Mardiasmo (2004:18) mendefinisikan *Good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang sejalan dengan prinsip demokrasi, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politik dan administratif. Pemerintahan yang baik setidaknya ditandai dengan tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Partisipasi maksudnya mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

Untuk mewujudkan *good governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistik, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan

menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Untuk mewujudkan *good governance* tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka diperlukan reformasi pengelolaan keuangan daerah dan reformasi keuangan negara. Peraturan perundangan yang berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Sedangkan tiga paket perundang-undangan dibidang keuangan negara yang menjadi landasan hukum bagi reformasi di bidang keuangan negara sebagai upaya untuk mewujudkan *good governance* yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara, serta Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengawasan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang memayungi pengelolaan keuangan negara maupun keuangan daerah.

Reformasi pengelolaan keuangan Negara ditandai dengan terbitnya paket undang-undang keuangan yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Salah satu hal penting yang diatur dalam paket ketentuan tersebut adalah adanya kewajiban kepala daerah menyusun dan menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPRD berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah tersebut terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah. Secara eksplisit menyatakan dalam surat pernyataan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. (www.auditortrk.blogspot.com)

Dalam pasal 33 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (PKKIP) diatur bahwa Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan reviu atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan

(BPK). Oleh karena itu, proses reviu menjadi krusial untuk dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan amanah peraturan perundangan dan dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik.

Pengertian Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Permendagri No.4 tahun 2008) adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk member keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Keyakinan terbatas yang dimaksud dalam pengertian di atas adalah karena dalam reviu tidak dilakukan pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber.

Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah dilakukan untuk memberikan keyakinan atas kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan pendapat (opini) atas laporan keuangan. Selain itu, reviu memiliki tingkat keyakinan lebih rendah dibandingkan audit.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kegiatan reviu seringkali memiliki persamaan dengan pelaksanaan kegiatan audit. Untuk menghindari hal tersebut, maka perlu diberikan batasan-batasan yang membedakan antara kegiatan reviu dengan kegiatan audit.

Berbeda dengan Audit, reviu tidak mencakup pengujian catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan melalui perolehan bahan bukti, serta prosedur lainnya seperti yang dilaksanakan dalam suatu audit. Sebagai contoh, dalam hal pengadaan barang modal yang nilainya material, proses reviu hanya meyakinkan bahwa pengadaan barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedang dalam audit, harus dilakukan pengujian bahwa prosedur pengadaan barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perbedaan juga dapat dilihat berdasarkan tujuan audit yaitu untuk memberikan dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, sedangkan tujuan reviu hanya sebatas memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan. Reviu tidak mencakup suatu pengujian atas kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang/jasa, bukti pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit.

Ruang lingkup reviu laporan keuangan pemerintah daerah meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan sistem pengendalian intern (SPI) dan kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP). Dalam mereviu laporan keuangan pemerintah daerah, yang akan di reviu adalah Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Hal ini dilakukan untuk memberikan

keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan disajikan telah sesuai dengan standar akuntansi. Penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan SAP yaitu mencakup :

a. Jenis laporan

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

b. Basis akuntansi

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, basis akuntansi yang digunakan adalah basis kas menuju akrual (*cash to ward accrual*).

c. Penilaian pos-pos laporan keuangan

d. Struktur APBD

e. Klasifikasi anggaran pendapatan dan belanja, serta klasifikasi asset, kewajiban, ekuitas, arus kas

f. Catatan atas laporan keuangan

Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sebagai suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar Akuntansi Keuangan. Namun dalam pelaksanaannya sering kali laporan keuangan tersebut tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu juga terdapat sistem pengendalian intern yang kurang memadai. Oleh sebab itu, sebelum kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab maka Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) harus melakukan reviu terlebih dahulu untuk memastikan bahwa laporan keuangan

pemerintah telah disajikan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sehubungan dengan penjabaran diatas tentang pentingnya melakukan review atas laporan keuangan pemerintah sebelum kepala daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA)”.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Bagaimana bentuk reviu laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008?
- b. Apakah prosedur reviu yang dilakukan oleh Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008?
- c. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Pemerintah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dalam melaksanakan reviu laporan keuangan?
- d. Apakah reviu yang telah dilakukan oleh Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA mampu mencegah penyajian informasi yang tidak handal ?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui prosedur dan bentuk hasil reviu laporan keuangan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008.

- b. Mengetahui prosedur dan hasil revid laporan keuangan pada Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.
- c. Mengetahui kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA dalam melaksanakan revid laporan keuangan.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Sebagai tambahan literatur Akademis dalam pengembangan praktik akuntansi terutama tentang revid laporan keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Sebagai kontribusi bagi pemerintah untuk perbaikan pelaksanaan revid laporan keuangan agar menjadi lebih baik.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini dibagi menjadi enam bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini membahas mengenai teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian dan pembahasan selanjutnya, penelitian- penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesa penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Menguraikan tentang populasi dan sampel, jenis dan sumber data, variabel penelitian yang digunakan beserta pengukurannya, perumusan

model penelitian, penjelasan uji normalitas data, uji asumsi klasik dan uji hipotesa.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

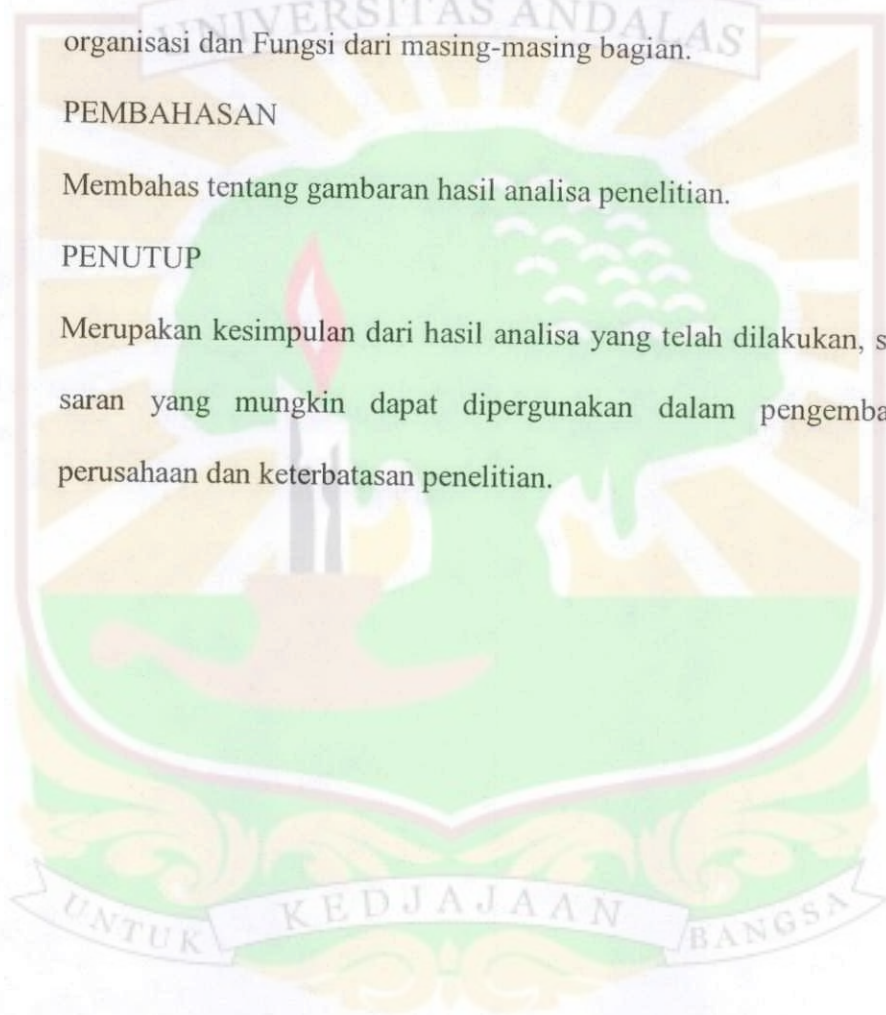
Bab ini menguraikan tentang sejarah umum perusahaan, struktur organisasi dan Fungsi dari masing-masing bagian.

BAB V PEMBAHASAN

Membahas tentang gambaran hasil analisa penelitian.

BAB VI PENUTUP

Merupakan kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan, saran-saran yang mungkin dapat dipergunakan dalam pengembangan perusahaan dan keterbatasan penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Reviu Laporan Keuangan Pemda

2.1.1 Dasar Hukum Reviu Laporan Keuangan Pemda

Dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyusun petunjuk teknis reviu laporan keuangan antara lain :

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- b. Undang-undang RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- c. Undang-undang RI Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- d. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
- e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- g. Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
- h. Peraturan pemerintah RI Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pengertian dalam Perdirjen tersebut lebih menekankan kepada langkah yang ditempuh dalam proses revidi tetapi tujuannya sama. SPAP merupakan acuan bagi akuntan publik sebagai eksternal auditor dalam memberikan jasa revidi. Sedangkan Perdirjen merupakan acuan Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) dalam melakukan revidi terhadap laporan keuangan pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Revidi berbeda dengan audit antara lain karena revidi memberikan dasar untuk menyatakan pendapat seperti dalam audit. Menurut SPAP revidi tidak mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern, pengujian atas catatan akuntansi, dan pengujian atas respon terhadap permintaan keterangan dengan cara pemerolehan bahan bukti dan prosedur tertentu lainnya yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

Sejalan dengan SPAP, pengertian revidi menurut Perdirjen tidak termasuk revidi atas pengendalian intern dan tidak dimaksudkan untuk memberikan pendapat. Revidi juga tidak mencakup pengujian bukti seperti yang biasanya dilaksanakan dalam audit. Sebagai contoh, dalam hal pembelian barang modal yang nilainya material, proses revidi hanya meyakinkan bahwa pembelian barang telah dicatat dalam aktiva tetap, sedangkan dalam audit harus diuji bahwa prosedur pembelian barang tersebut telah dilakukan sesuai dengan prosedur pengadaan seperti telah melalui prosedur lelang, pembayaran kepada penyedia barang telah dilakukan berdasarkan kemajuan pekerjaan atau didukung bukti serah terima barang jasa.

Reviu yang dilakukan APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan) sebagai pelaksana dari pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 agak berbeda dengan pengertian yang diungkapkan dalam SPAP maupun Perdirjen reviu yang dilakukan berdasarkan PP No. 8 tahun 2006 dimaksudkan untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan dalam rangka pernyataan tanggung jawab (*statement of responsibility*) atas laporan keuangan tersebut. Pernyataan tanggung jawab memuat menyatakan bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPA).

Oleh karena itu reviu yang akan dilakukan berdasarkan PP 8/2006 harus meliputi reviu atas sistem pengendalian intern dan sesuai dengan SAP. Namun demikian sistem pengendalian intern di reviu dibatasi pada pengendalian yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan. reviu dapat mengarahkan aparat pengawasan intern kepada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan bahwa Aparat Pengawasan Intern akan mengetahui semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan, Aparat Pengawasan Intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan. Sebagai contoh pembelian tanah/bangunan yang akan diserahkan kepada masyarakat harus dicatat sebagai persediaan, bukan aset tetap.

2.1.3 Tujuan Reviu Laporan Keuangan

Tujuan reviu dalam konteks pemerintahan daerah adalah untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada kepala daerah. Dalam hal ini, tujuan reviu hanya memberikan keyakinan terbatas sehingga reviu tidak memberikan dasar bagi Aparat Pengawas Intern untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan seperti dalam pelaksanaan audit. (www.auditortrk.blogspot.com)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2008 (Pasal 3, ayat 1), tujuan reviu laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

2.1.4 Ruang Lingkup Reviu Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 (Pasal 2 dan 3), ruang lingkup reviu adalah sebatas penelaahan Sistem Pengendalian Intern dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP. Kelemahan dalam pengendalian intern dan ketidak sesuaian dengan SAP yang diidentifikasi memerlukan penelaahan lebih lanjut. Penelaahan lebih lanjut dapat dilakukan dalam rangka melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar,

buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang digunakan dalam sistem akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.1.5 Sasaran Reviu Laporan Keuangan

Sasaran reviu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 (Pasal 2, ayat 2) adalah laporan keuangan yang disajikan oleh PRKD. Laporan keuangan yang dimaksud adalah mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas.

2.1.6 Konsep Dasar Reviu Laporan Keuangan

Dalam Permendagri Nomor 04 Tahun 2008, konsep dasar yang digunakan dalam reviu adalah :

- a. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu paralel dimaksudkan untuk memperoleh informasi tepat waktu agar koreksi dapat dilakukan segera. Laporan keuangan yang disajikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah diajukan kepada kepala daerah sudah mengakomodasi hasil reviu APIP.
- b. Reviu tertuju pada hal-hal penting yang mempengaruhi laporan keuangan, namun tidak memberikan keyakinan akan semua hal penting yang akan terungkap melalui suatu audit. Reviu memberikan keyakinan bagi APIP bahwa tidak ada modifikasi (koreksi/penyesuaian) material yang harus dilakukan agar laporan keuangan yang di reviu sesuai dengan SAP, baik segi pengakuan, penilaian, pengungkapan dan sebagainya.

- c. Reviu tidak memberikan dasar untuk menyatakan suatu pendapat (opini) seperti halnya dalam audit, meskipun reviu mencakup suatu pemahaman atas pengendalian intern secara terbatas.
- d. Dalam reviu tidak dilakukan pengujian terhadap kebenaran substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak pengadaan barang dan jasa, bukti pembayaran / kuitansi, dan berita acara fisik atas pengadaan barang dan jasa.
(www.auditortrk.blogspot.com)

2.2 Tahapan Reviu Laporan Keuangan

Menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2008 (Lampiran 1 : 11), dalam melaksanakan reviu laporan keuangan ada tiga tahap yang harus dilakukan. Perencanaan reviu, pelaksanaan reviu, dan pelaporan hasil reviu laporan keuangan.

2.2.1 Perencanaan Reviu Laporan Keuangan

Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan reviu agar kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan.

2.2.1.1 Pemahaman atas Entitas

Pemahaman lingkungan entitas pelaporan perlu dilakukan pada tahap perencanaan agar tim reviu dapat mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang terjadi, memilih dengan tepat prosedur reviu berupa wawancara, prosedur analitis, atau prosedur reviu lainnya. Pemahaman terhadap entitas pelaporan ini meliputi :

- a. Pemahaman terhadap latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan. Pemahaman ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan berita-berita berkaitan dengan entitas termasuk peraturan perundangan yang terkait, membaca laporan keuangan dan hasil reviu entitas dari periode sebelumnya, serta informasi lain yang terkait.
- b. Pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan. Hal ini dapat dilakukan dengan membaca Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Kebijakan Akuntansi serta melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam tiap proses transaksi untuk kemudian mendokumentasikan alur tahap-tahap dari proses transaksi yang signifikan.
- c. Pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan entitas dapat dilakukan dengan mempelajari Kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait dalam proses akuntansi, membaca laporan keuangan entitas dan membaca kertas kerja entitas periode sebelumnya.

2.2.1.2 Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern

Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam

pencapaian efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan keandalan penyajian laporan keuangan. Penilaian atas SPI dalam tahapan perencanaan revidi ini berguna untuk mengidentifikasi prosedur-prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mempunyai risiko untuk terjadinya salah saji secara material dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal yang harus diperhitungkan dalam penilaian SPI adalah apakah Inspektorat telah melakukan penilaian yang sama di periode sebelumnya atau diproses audit lainnya. Jika penilaian keandalan atas SPI sudah pernah dilakukan, maka tim revidi dapat memahami mengenai pengendalian intern dari dokumentasi periode sebelumnya dan hanya perlu melakukan update terhadap perubahan yang terjadi.

Proses penilaian atas SPI dilakukan dengan proses sebagai berikut :

- a. Memahami sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang meliputi :
 - 1) Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas.
 - 2) Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas.
 - 3) Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja.
 - 4) Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD).
 - 5) Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan.

Inspektorat harus mengembangkan pemahaman tersebut secara rinci sampai pada subsistem-subsistem yang ada, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah dan/atau Peraturan Perundangan lainnya. Misalnya :

- Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas dikembangkan dalam subsistem Penerimaan Kas melalui Bendahara Penerimaan, subsistem Penerimaan Kas melalui bank dan seterusnya.
- Sistem dan Prosedur Pengeluaran Kas dikembangkan dalam subsistem Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), subsistem Pengajuan Dana Uang Persediaan (UP), subsistem Pengajuan Dana Ganti Uang (GU), subsistem Pengajuan Dana Langsung (LS), subsistem Pertanggungjawaban Bendahara, dan seterusnya.
- Sistem dan Prosedur Akuntansi Satuan Kerja dikembangkan dalam subsistem Akuntansi Pendapatan SKPD, subsistem Akuntansi Bendahara dengan UP, subsistem Akuntansi Belanja LS, subsistem Akuntansi untuk Aset Tetap, subsistem Akuntansi untuk Transaksi Non Kas dan seterusnya.
- Sistem dan Prosedur Akuntansi PPKD dikembangkan dalam subsistem Akuntansi Pendapatan dana Perimbangan, subsistem Akuntansi Belanja Hibah dan Bantuan, subsistem Akuntansi Konsolidasi, subsistem akuntansi untuk Investasi, subsistem Akuntansi untuk Hutang Jangka Panjang dan seterusnya.
- Sistem dan Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan dikembangkan dalam subsistem Penyusunan Laporan Keuangan SKPD, subsistem

Penyusunan Laporan Keuangan PPKD, subsistem Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasi, dan seterusnya.

- b. Melakukan observasi dan / atau wawancara dengan pihak terkait di setiap prosedur yang ada. Aktivitas ini mengidentifikasi resiko yang mungkin timbul di setiap sub proses yang ada dan keberadaan sistem pengendalian dalam rangka mengantisipasi resiko yang bersangkutan.
- c. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang kemungkinan terjadinya salah saji yang material dalam penyusunan laporan keuangan. Misalnya, pada sub proses pencairan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) GU, bendahara pengeluaran SKPD mencairkan dokumen SP2D yang diterima dan pada saat bersamaan PPK-SKPD sebagai petugas akuntansi tidak mendapatkan lampiran SP2D yang bersangkutan. SPI seharusnya mengarahkan alur dokumen SP2D dari BUD menuju Pengguna Anggaran terlebih dahulu. Ketiadaan prosedur SPI terkait menyebabkan PPK-SKPD tidak melakukan pencatatan atas penerimaan kas (SP2D GU) dengan benar. Dari kasus ini terdapat resiko terjadinya salah saji pada akun Kas di Bendahara pengeluaran dalam Neraca SKPD.
- d. Melakukan analisis atas resiko yang telah diidentifikasi pada sebuah kesimpulan tentang arah pelaksanaan reviu. Misalnya, hasil wawancara saat penilaian SPI terdapat informasi bahwa Neraca Saldo suatu SKPD seringkali terjadi kesalahan, sehingga menimbulkan resiko adanya salah saji dalam laporan keuangan SKPD yang bersangkutan dan juga laporan konsolidasi.

Atas informasi tersebut, pada tahap pelaksanaan reviu diperlukan penelusuran angka sampai pada buku besar di SKPD bersangkutan.

Proses penilaian SPI dalam langkah 1 sampai 4 di atas didokumentasikan dalam table penilaian SPI yang dibuat untuk setiap Sub-sistem yang telah dikembangkan di setiap SKPD dan SKPKD.

2.2.1.3 Penyusunan Program Kerja Reviu

Tahapan terakhir dalam perencanaan reviu adalah membuat Program Kerja Reviu (PKR) sebagai panduan agar pelaksanaan reviu dapat lebih terarah. PKR disusun berdasarkan tahapan-tahapan dalam perencanaan reviu yang telah dilakukan sebelumnya. PKR harus memuat antara lain:

- a. Langkah kerja reviu, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tim reviu dalam melaksanakan reviu laporan keuangan.
- b. Teknik reviu, yang merupakan cara-cara yang dapat dilakukan dalam melaksanakan langkah kerja reviu. Teknik reviu meliputi antara lain: wawancara, pengisian kuesioner, prosedur analitis, dan teknik reviu lainnya yang dianggap perlu.
- c. Sumber data, yang merupakan bahan-bahan yang diperlukan dalam melakukan teknik reviu. Sumber data dapat berasal dari data yang disediakan oleh entitas pelaporan.
- d. Pelaksana, yang merupakan nama tim reviu yang akan melakukan langkah-langkah reviu.

- e. Waktu pelaksanaan, yang menjelaskan kapan langkah-langkah reviu harus dilakukan.

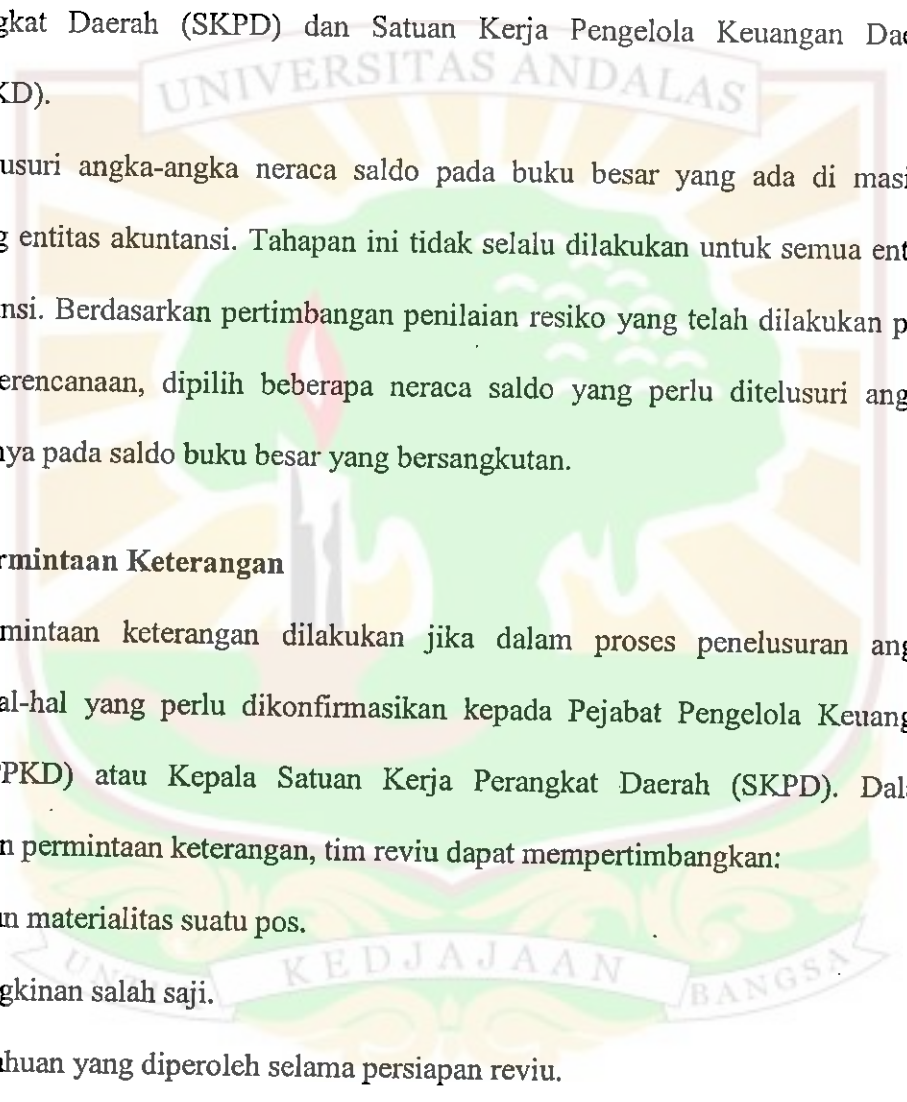
2.2.2 Pelaksanaan Reviu Laporan keuangan

Pelaksanaan reviu dilakukan oleh tim secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah. Reviu tersebut dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut di atas dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

2.2.2.1 Penelusuran Angka

Dalam melaksanakan reviu, tim reviu perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar. Pelaksanaan teknik penelusuran angka dapat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

- a. Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi yang telah disajikan menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada laporan keuangan konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri No. 13/2006).

- 
- b. Menelusuri angka laporan keuangan konsolidasi pada kertas kerja konsolidasi, khususnya angka-angka yang dihasilkan dalam proses eliminasi dan penggabungan dari neraca saldo–neraca saldo yang bersumber dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- c. Menelusuri angka-angka neraca saldo pada buku besar yang ada di masing-masing entitas akuntansi. Tahapan ini tidak selalu dilakukan untuk semua entitas akuntansi. Berdasarkan pertimbangan penilaian resiko yang telah dilakukan pada saat perencanaan, dipilih beberapa neraca saldo yang perlu ditelusuri angkanya pada saldo buku besar yang bersangkutan.

2.2.2.2 Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam menentukan permintaan keterangan, tim reviu dapat mempertimbangkan:

- a. Sifat dan materialitas suatu pos.
- b. Kemungkinan salah saji.
- c. Pengetahuan yang diperoleh selama persiapan reviu.
- d. Pernyataan tentang kualifikasi para personel bagian akuntansi entitas tersebut.
- e. Seberapa jauh pos tertentu dipengaruhi oleh pertimbangan manajemen.
- f. Ketidacukupan data keuangan entitas yang mendasar.

g. Ketidaklengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Permintaan keterangan meliputi antara lain:

- a. Kesesuaian antara sistem akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan oleh entitas tersebut dengan peraturan yang berlaku.
- b. Kebijakan dan metode akuntansi yang diterapkan oleh entitas yang bersangkutan.
- c. Prosedur pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran transaksi serta penghimpunan informasi untuk diungkapkan dalam laporan keuangan.
- d. Keputusan yang diambil oleh pimpinan entitas pelaporan /pejabat keuangan yang mungkin dapat mempengaruhi laporan keuangan.
- e. Memperoleh informasi dari audit atau reviu atas laporan keuangan periode sebelumnya.
- f. Personel yang bertanggung jawab terhadap akuntansi dan pelaporan keuangan mengenai :
 - Apakah pelaksanaan anggaran telah dilaksanakan sesuai dengan Sistem Pengendalian Intern yang memadai.
 - Apakah laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - Apakah terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada entitas pelaporan tersebut.
 - Apakah ada masalah yang timbul dalam implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan dan pelaksanaan sistem akuntansi.

- Apakah terdapat kejadian setelah tanggal neraca yang berpengaruh secara material terhadap laporan keuangan.

2.2.2.3 Prosedur Analitis

Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya. Dalam merancang prosedur ini Inspektorat harus mempertimbangkan hasil reviu Sistem Pengendalian Intern (SPI). Hal ini dilakukan agar reviu kesesuaian dengan SAP dapat terarah pada komponen laporan keuangan dan akun-akun yang lemah pengendaliannya. Dengan demikian Inspektorat dapat lebih memperdalam materi reviunya, serta mempertimbangkan jenis-jenis masalah yang membutuhkan penyesuaian, seperti terjadinya peristiwa luar biasa dan perubahan kebijakan akuntansi. Contoh hubungan antar komponen laporan keuangan atau lampirannya dalam prosedur analitis, antara lain:

- a. Hubungan antara penambahan Aktiva Tetap dalam Neraca dengan Realisasi Belanja Modal dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- b. Hubungan antara laporan / daftar aktiva tetap yang dibuat oleh Bagian Akuntansi dengan Bagian Umum / Pengelola Barang /Aset.
- c. Menganalisis laporan keuangan untuk menentukan apakah laporan keuangan sesuai dengan SAP.

- d. Memperoleh laporan dari Inspektorat / aparat pengawasan intern pemerintah lain, jika ada yang telah melakukan audit atau reviu atas laporan keuangan tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk meyakini kesesuaian jumlah saldo awal pada neraca.

Penelaahan lebih lanjut setelah melakukan Prosedur Analitis tersebut di atas dapat dilakukan dengan melihat kesesuaian antara angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan terhadap buku besar, buku pembantu, catatan, dan laporan lain yang digunakan dalam Sistem Akuntansi di lingkungan pemerintah daerah yang bersangkutan.

2.2.2.4 Kertas Kerja Reviu

Mengingat adanya perbedaan keadaan pada setiap penugasan reviu atas laporan keuangan, maka tidak mungkin menentukan bentuk atau isi KKR yang perlu dibuat. Namun perlu diperhatikan bahwa KKR harus memuat masalah yang tercakup dalam permintaan keterangan dan prosedur analitis serta masalah yang dianggap tidak biasa selama melaksanakan reviu termasuk penyelesaiannya. Kegiatan reviu dituangkan dalam KKR sebagai pertanggungjawaban bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dokumentasi pelaksanaan reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung oleh KKR yang baik, dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Kertas kerja disusun pada saat kegiatan reviu berlangsung.
- b. Kertas kerja disusun dengan lengkap, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Mengacu kepada tahapan reviu yang telah ditetapkan.
 - Daftar isi KKR telah sesuai dengan fisik KKR-nya.
 - Disusun secara terstruktur dengan memperhatikan kesesuaian antara informasi utama dan data pendukung.
 - Berisi permasalahan yang ditemukan, baik yang telah ditindaklanjuti, masih dalam proses tindak lanjut, atau tidak dapat segera ditindaklanjuti oleh unit akuntansi yang bersangkutan.
- c. Memenuhi hal-hal sebagai berikut:
- Relevan: Informasi yang dimuat dalam KKR harus berhubungan dengan tujuan reviu dan permasalahan yang dihadapi.
 - Sesuai dengan Program Kerja Reviu: prosedur reviu dalam Program Kerja Reviu yang tidak dilaksanakan atau diubah perlu dibuat penjelasan yang memadai mengenai alasan pembatalan atau perubahannya.
 - Lengkap dan Cermat: informasi dan data dalam KKR harus lengkap dan cermat agar mendukung simpulan, LHR, permasalahan dan rekomendasinya.
 - Mudah Dipahami : KKR harus menggunakan bahasa yang sederhana, ringkas, dan alur fikir yang kronologis. Judul harus jelas untuk setiap permasalahan / topik. Simbol (*tickmark*) harus digunakan secara konsisten selama reviu serta diberi penjelasan yang memadai.
 - Rapi : Berhubungan dengan tata ruang penulisan, pengorganisasian dan pengelolaan fisik KKR. Harus ditulis pada satu muka, apabila diperlukan

untuk menulis pada halaman sebaliknya, harus dibuat petunjuk yang jelas. KKR harus diberi daftar isi, penomoran dan pemberian indeks secara sistematis, serta pemberian referensi yang jelas untuk menghubungkan informasi / data antar berbagai lembar KKR.

- Efisien : Harus dihindari pembuatan daftar yang tidak perlu, dan dimungkinkan menggunakan salinan (*copy*) dari catatan obyek yang direviu, Inspektorat cukup memberikan simbol (*tickmark*) untuk menandai reviu yang dilakukan.

2.2.3 Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan

Hasil reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah daerah (LKPD) disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam bentuk surat yang memuat pernyataan reviu, masalah yang terjadi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan, rekomendasi, serta koreksi yang telah dilakukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan hasil reviu ini disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota dalam rangka penandatanganan Pernyataan Tanggung Jawab.

2.3 Bentuk dan Isi Hasil Laporan Reviu (LHR)

LHR disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pernyataan reviu, komentar dan informasi tambahan (dasar reviu, tujuan, sasaran, ruang lingkup, simpulan dan rekomendasi, serta tindak lanjut hasil reviu). Pernyataan reviu

merupakan tempat menuangkan hasil reviu dalam bentuk Pernyataan Telah Direviu (PTD) yang dibuat Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota. Pernyataan Telah Direviu (PTD) dapat berupa:

- a. Pernyataan reviu tanpa paragraf penjelas yang dibuat apabila tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan tersebut sesuai dengan SAP.
- b. Pernyataan reviu dengan paragraf penjelas yang dibuat apabila:
 - Terjadi pembatasan dalam pelaksanaan reviu, atau
 - Ditemukan adanya penyimpangan terhadap standar akuntansi dan entitas pelaporan tidak melakukan koreksi seperti yang direkomendasikan oleh Inspektorat Daerah. Koreksi tidak dapat dilakukan antara lain karena: membutuhkan waktu yang relatif lama, sehingga baru dapat dilakukan pada periode berikutnya, koreksi bukan wewenang entitas yang bersangkutan, maupun karena kelalaian entitas yang bersangkutan.
 - Prosedur (teknik reviu) tidak dapat dilaksanakan.

Bentuk Laporan Hasil Reviu menurut Pusdiklat Pengawasan BPKP (pusdiklatwas.co.id) adalah : Laporan Hasil Reviu (LHR) disajikan dalam bentuk surat yang intisarinya memuat :

1. Pernyataan reviu
2. Komentar dan informasi tambahan, yaitu :
 - a. Dasar reviu

- b. Tujuan dan sasaran revidi
- c. Ruang lingkup revidi
- d. Simpulan dan rekomendasi
 - Penilaian pengendalian intern Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - Keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja (LKK) dan kesesuaian dengan SAP
 - Keandalan Ikhtisan Laporan Kinerja
- e. Tindak lanjut hasil revidi sebelumnya

Lampiran :

- Laporan keuangan yang telah direvidi
- Pernyataan telah direvidi

2.3.1 Penulisan Laporan

Dalam penulisan Laporan Hasil Revidi (LHR) hendaknya memperhatikan norma-norma penulisan laporan yang berlaku maupun mekanisme pelaporan sehingga dapat efektif membantu manajemen dalam mengambil keputusan. Norma penulisan LHR, antara lain:

- a. LHR harus menyajikan data yang relevan, dapat dibuktikan (*quantifiability*) dan tepat (*accuracy*)
- b. LHR harus komunikatif sehingga mudah dimengerti.
- c. LHR disusun menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.

- d. LHR hendaknya disusun sesegera mungkin (*timeliness*) agar dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

2.3.2 Mekanisme Pelaporan

Mekanisme pelaporan mulai dari konsep LHR sampai dengan penerbitannya tetap memperhatikan revidi berjenjang sebelum laporan disetujui / ditandatangani dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Ketua tim menyusun konsep LHR segera setelah pekerjaan lapangan selesai dan diserahkan kepada Supervisor / Pengendali Teknis. Konsep LHR sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
 - *Routing slip*
 - Fotokopi surat tugas
 - Pernyataan revidi (dua lembar, satu lembar untuk laporan keuangan dan satu lembar untuk LHR)
 - Notasi hasil revidi (koreksi) dan tindak lanjut yang telah dilakukan
 - Kertas Kerja Revidi (KKR)
 - Lembar revidi konsep LHR (*review sheet*)
- b. Supervisor / Pengendali Teknis merevidi konsep LHR dengan memperhatikan:
 - Kesesuaian bentuk dan susunan LHR dengan petunjuk / standar
 - Kelengkapan dokumen pendukung
 - Ketepatan perhitungan aritmatika yang ada dalam LHR
 - Kesesuaian badan laporan dengan daftar isi dan lampiran

- Kelengkapan dan kesesuaian unsur-unsur permasalahan dalam LHR
 - Kesesuaian tata cara penulisan LHR dengan Petunjuk Teknis Tata Persuratan Dinas seperti bentuk dan ukuran huruf, penulisan alamat, tembusan dan penomoran.
- c. Pembantu Penanggung Jawab / Pengendali Mutu mereviu konsep LHR dengan memperhatikan:
- Ketepatan materi dan rekomendasi.
 - Kesesuaian LHR dengan norma pelaporan.
- d. Inspektur mereviu Konsep LHR sebelum menandatangani.

2.4 Pengertian dan Tujuan Laporan Keuangan

2.4.1 Pengertian laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah bentuk pertanggung jawaban kepala daerah atas pelaksanaan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan keuangan.

2.4.2 Tujuan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun dan disediakan sebagai sarana informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah daerah selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan pemerintah Daerah digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai

efektivitas dan efisiensi Pemerintah Daerah dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik, dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai apakah penerimaan periode berjalan cukup untuk membiayai seluruh anggaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai apakah cara memperoleh sumber dananya ekonomis dan alokasinya telah sesuai dengan anggaran yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber dana ekonomis yang digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Pemerintah Daerah mendanai seluruh kegiatan dalam mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah, berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya baik jangka panjang maupun jangka pendek, termasuk yang berasal dari pungutan akibat pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Daerah apakah mengalami kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

2.5 Komponen-komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2.5.1 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

- a. Kas dan setara kas
- b. Investasi jangka pendek
- c. Piutang pajak dan bukan pajak
- d. Persediaan
- e. Investasi jangka panjang
- f. Asset tetap
- g. Kewajiban jangka pendek
- h. Kewajiban jangka panjang
- i. Ekuitas dana

Dalam Neraca ada yang dikatakan sebagai Aset Lancar, Aset Non lancar, Kewajiban Jangka Pendek, Kewajiban Jangka Panjang, dan Ekuitas Dana.

Suatu Aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar apabila diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, atau berupa kas dan setara kas. Aset Lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pos-pos investasi jangka panjang antara lain deposito berjangka 3 sampai 12 bulan, surat berharga yang mudah diperjual belikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan.

Aset Nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau digunakan masyarakat umum. Aset Nonlancar diklasifikasikan menjadi :

a. Investasi jangka panjang

Merupakan investasi yang dimaksud untuk dimiliki selama lebih dari 12 bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi permanen dan investasi nonpermanen.

(a) Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen terdiri dari penyertaan modal pemerintah pada perusahaan Negara / Daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya milik Negara. Serta investasi permanen yang lainnya.

(b) Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi nonpermanen terdiri dari pembelian surat utang Negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan investasi nonpermanen lainnya.

b. Aset tetap

Merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

c. Dana cadangan

Merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dan relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

d. Aset lainnya

Yang termasuk kedalam kelompok aset lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, dan aset kerjasama dengan pihak ketiga.

Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang jatuh tempo waktu aslinya adalah periode lebih dari 12 bulan, entitas bermaksud mendanai kembali kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang, dan maksud tersebut didukung dengan adanya

suatu perjanjian pendanaan kembali atau adanya perjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Ekuitas dana dalam pelaporannya didalan Neraca terbagi atas tiga, yaitu :

- a. Ekuitas dana lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain sisa lebih pembiayaan anggaran, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.
- b. Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.
- c. Ekuitas dana cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.5.2 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan realisasi anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut :

a. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan

yang menjadi hak pemerintahan, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

b. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi akuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

c. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

d. Surplus atau Defisit

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan.

e. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayarkan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

f. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

g. **Pembiayaan neto**

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

h. **Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)**

SiLPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.

2.5.3 Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

a. **Aktivitas operasi**

Merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Arus kas masuk dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari penerimaan perpajakan, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerimaan hibah, penerimaan bagian laba perusahaan negara/daerah dan investasi lainnya, dan transfer masuk. Sedangkan arus kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk

pengeluaran belanja pegawai, belanja barang, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain/tak terduga, dan transfer keluar.

b. Aktivitas investasi aset non keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumberdaya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan berasal dari penjualan aset tetap, penjualan aset lainnya. Sementara arus keluar dari aktivitas investasi aset nonkeuangan berasal dari perolehan aset tetap, perolehan aset lainnya.

c. Aktivitas pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan Surat Utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman, dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan berasal dari penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, pemberian pinjaman jangka panjang, dan pembentukan dana cadangan.

d. **Aktivitas nonanggaran**

Arus kas dari aktivitas nonanggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang. Perhitungan pihak ketiga menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang masuk. Sementara arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran perhitungan pihak ketiga dan kiriman uang keluar.

2.5.4 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan Keuangan meliputi penjelasan daftar rincian atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini merupakan studi kasus yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat analisis revidi laporan keuangan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

3.2 Objek Penelitian

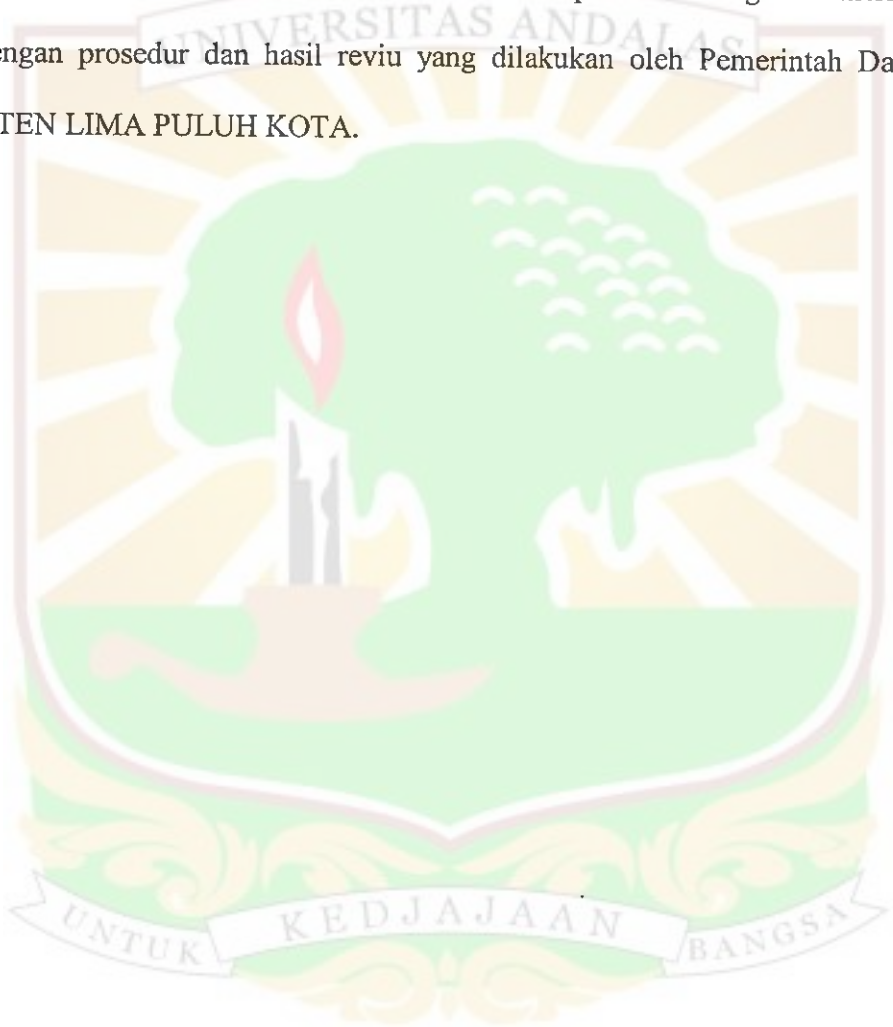
Objek penelitian adalah proses revidi dan hasil revidi yang dilakukan oleh Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA terhadap laporan keuangan yang disusun oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kualitatif. Data penelitian berupa laporan keuangan yang terdiri atas Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari objek yang akan diteliti yaitu berupa informasi yang diperoleh langsung dari pihak Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA yang diperoleh melalui wawancara dan observasi. Sedangkan data sekunder adalah data primer yang telah diperoleh dari

3.5 Metode Analisis

Dalam menganalisis data yang terkumpul, penulis akan menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu membandingkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan prosedur dan hasil reviu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA.



BAB IV

GAMBARAN UMUM INSPEKTORAT

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

4.1 Tugas Pokok dan Fungsi Pejabat Pengawas pada Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

4.1.1 Inspektur

Inspektur memiliki wewenang membantu kepala Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

Dalam melaksanakan wewenangnya, inspektur mempunyai tugas :

- a. Memimpin Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengawasan pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan, Dinas, Kantor, Kecamatan, Unit Pelaksanaan Teknis Dinas, Cabang Dinas, BUMD dan Pemerintahan Nagari.
- c. Merumuskan kebijakan penyelenggaraan pengawasan daerah
- d. Mengevaluasi pelaksanaan pengawasan daerah
- e. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan bupati

Dalam melaksanakan tugasnya, inspektur mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan perumusan kebijakan teknis pengawasan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Pimpinan SKPD dan Wali Nagari

- c. Menghimpun, menyiapkan dan mengolah bahan dan data kepegawaian
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh secretaries.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan penata usahaan rumah tangga Inspektur Kabupaten
- b. Penyelenggaraan penata usahaan barang inventaris Inspektur Kabupaten.
- c. Pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Inspektorat Kabupaten.

4.1.4 Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai wewenang membantu Sekretaris dalam bidang evaluasi dan pelaporan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan dan pelaksanaan gelar pengawasan daerah, regional dan nasional.
- b. Menghimpun dan mengolah data tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- c. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan Laporan Pengawasan, Laporan Pengawasan dan Laporan Kinerja Inspektorat.
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian di lingkungan Sekretariat Inspektorat Kabupaten.
- b. Penyiapan vahan evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pemutakhiriran data pengawasan.
- c. Penyelesaian Hasil Pengawasan.

4.1.4 Kepala Sub Bagian Perencanaan

Kepala Sub Bagian evaluasi dan Pelaporan mempunyai wewenang membantu Sekretaris dalam urusan tata usaha meliputi perencanaan kegiatan dan administrasi keuangan.

Dalam melaksanakan wewenangnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dan data dalam rangka menyusun rencana program / Kegiatan Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka menyusun rencana anggaran Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- c. Melaksanakan ketatausahaan, keuangan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- d. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bagian Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dengan Sub Bagian Sekretariat Inspektorat.
- b. Penginventarisasian dan pelaksana urusan yang berkaitan dengan perencanaan

- c. Penyiapan bahan penyusunan dan pengendalian / program kerja pengawasan, penghimpunan Peraturan Perundang – undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan.
- d. Pengkoordinasian seluruh kegiatan administrasi keuangan.
- e. Pehimpunan peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan pengelolaan teknis keuangan
- f. Pemberian pelayanan teknis administrasi keuangan meliputi rencana anggaran, SPJ, gaji dan urusan keuangan lainnya.
- g. Penyiapan / penyusunan anggaran tahunan Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota.
- h. Pelaksanaan kegiatan evaluasi dalam rangka penertiban administrasi keuangan.
- i. Penyusunan rincian tugas.

4.1.6 Inspektur Pembantu Wilayah

Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Inspektorat. Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan sesuai dengan wilayah kerjanya. Dalam menyelenggarakan tugasnya, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan pada bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta aparatur.

- b. Pelaksanaan pemeriksaan dan monitoring serta evaluasi di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta aparatur pengendalian dan pengevaluasian pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta aparatur.
- c. Pengendalian dan pengevaluasian pengawasan bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta aparatur.
- d. Penyiapan dan penyusunan serta penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan monitoring dan evaluasi kepada inspektur.

Inspektur Pembantu Wilayah terdiri dari Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III dan Inspektur Pembantu Wilayah IV. Adapun wilayahnya adalah sebagai berikut :

Wilayah I :

1. Kecamatan Pangkalan Koto Baru
2. Kecamatan Kapur IX
3. Kecamatan Harau
4. Nagari, Sekolah, Puskesmas yang berada di wilayah I
5. Dinas Koperasi dan UKM
6. Dinas Koperasi dan Perdagangan
7. Dinas Pariwisata Seni dan Budaya
8. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
9. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
10. RSUD Suliki

11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

12. Dinas Perkebunan

Wilayah II :

1. Kecamatan Akabiluru

2. Kecamatan Luhak

3. Kecamatan Lareh Sago Halaban

4. Kecamatan Situjuh Limo Nagari

5. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di Wilayah II

6. Dinas Tanaman Pangan dan Kultitura

7. Dinas Peternakan

8. Dinas Pendidikan

9. Badan Kepegawaian daerah

10. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

11. SETDA

Kantor Ketahanan Pangan

12. Dinas Pemuda dan Olah Raga

Wilayah III :

1. Kecamatan Gunung Omeh

2. Kecamatan Suliki

3. Kecamatan Bukik Barisan

4. Nagari, Sekolah dan Puskesmas yang berada di wilayah III

5. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral

6. Dinas Perikanan
7. Dinas Perhubungan, Telekomunikasi dan Informasi
8. BAPPEDA
9. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutan
10. SETWAN
11. Kantor Penanaman Modal
12. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan

Wilayah IV :

1. Kecamatan Guguk
2. Kecamatan Mungka
3. Kecamatan Payakumbuh
4. Nagari, Sekolah dan Peskesmas yang berada di wilayah IV
5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
6. Dinas Kesehatan
7. Dinas Kehutanan
8. Dinas Pekerjaan Umum
9. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
10. Kantor Satpol-PP
11. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
12. Kantor Perpustakaan dan Arsip

4.1.6 Kelompok Pejabat Fungsional Auditor

Pejabat Fungsional Auditor mempunyai wewenang membantu inspektur dalam melaksanakan pemeriksaan secara profesional atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

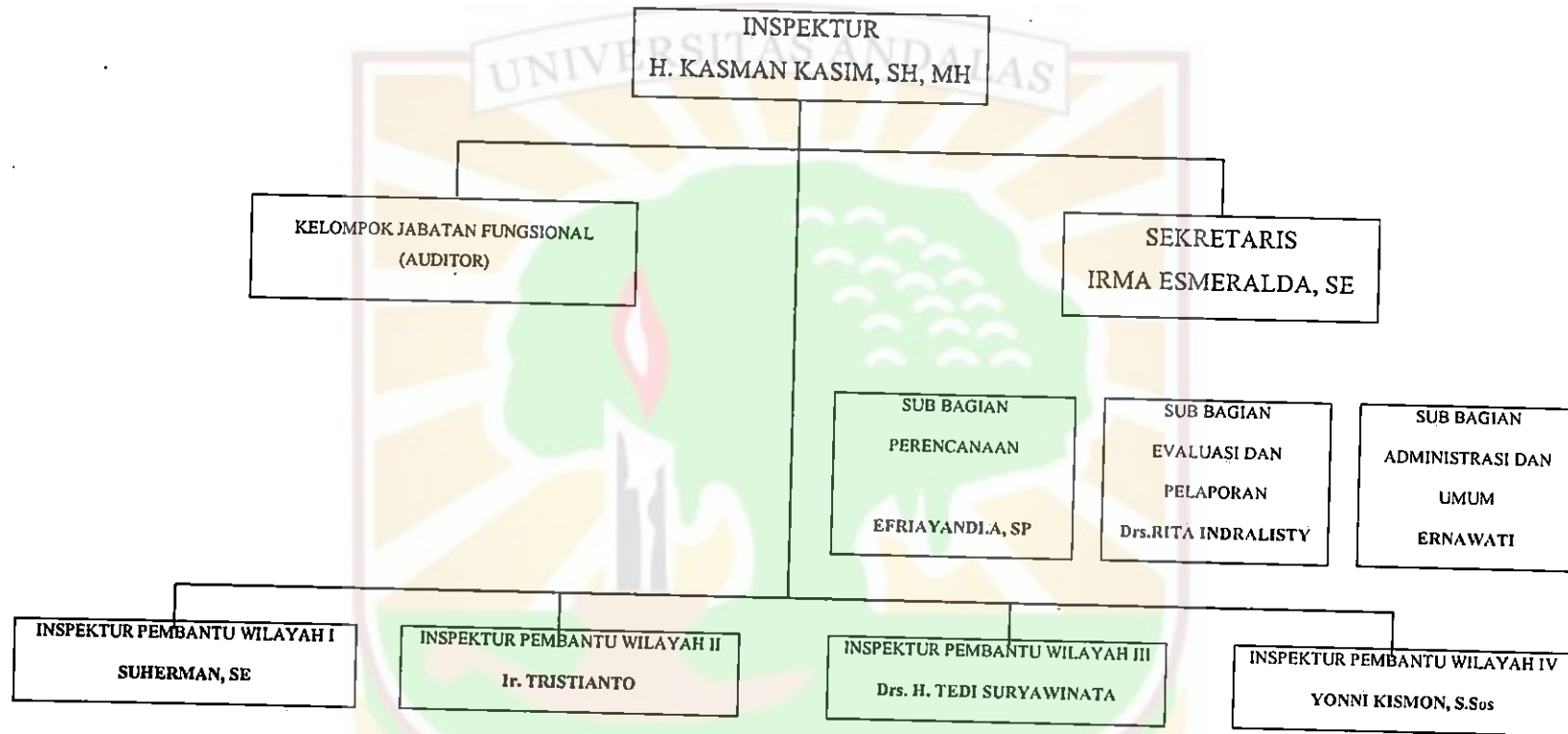
Dalam melaksanakan wewenangnya, pejabat fungsional mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengawasan melalui pemeriksaan berkala atau sewaktu – waktu, pengujian laporan berkala, pengusutan atas laporan mengenai adanya indikasi penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme serta penilaian atas manfaat keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- b. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh inspektur.

Untuk melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Auditor mempunyai fungsi :

- a. Pengumpulan bahan penyusunan rencana pemeriksaan
- b. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, penilaian pengujian terhadap kegiatan – kegiatan di bidang penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kabupaten, urusan Kecamatan dan Pemerintahan Nagari.
- c. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan Pimpinan SKPD, Wali Nagari
- d. Pengujian atas laporan berkala dan atau sewaktu – waktu urusan Pemerintahan Daerah
- e. Penyiapan, Penyusunan dan Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Inspektur.

4.2 Struktur Organisasi Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

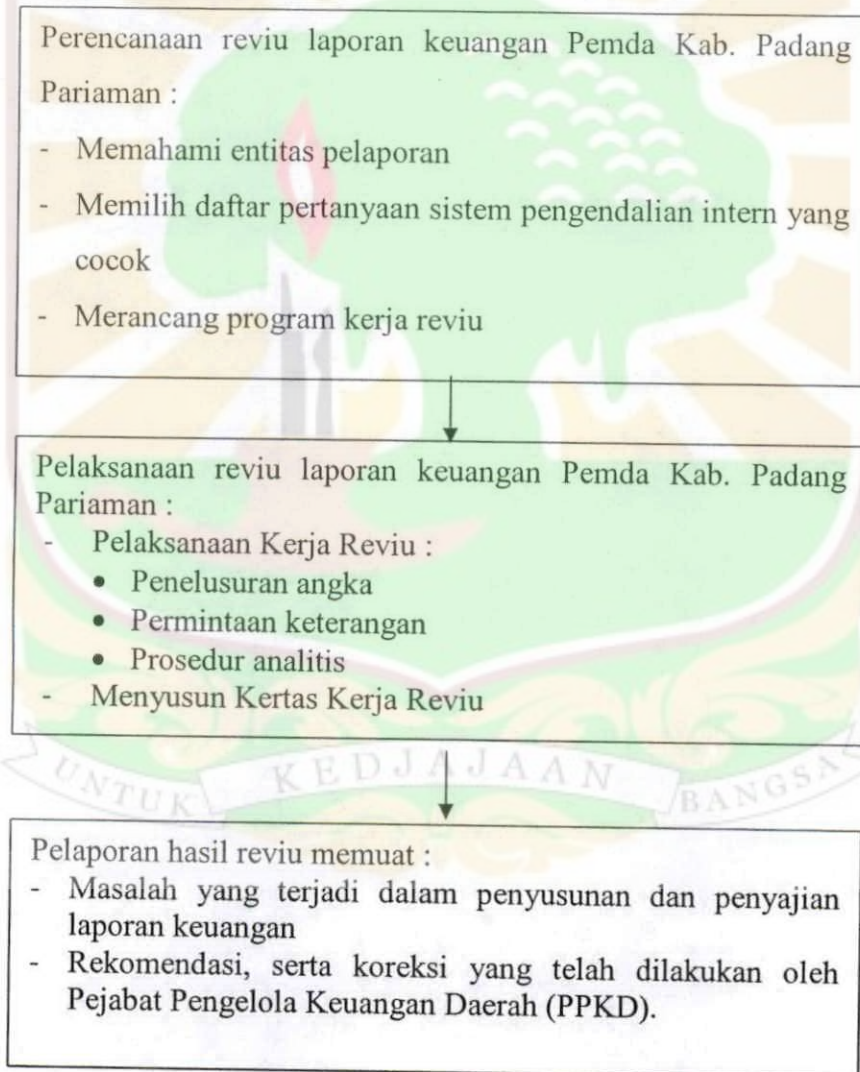


BAB V

PEMBAHASAN

5.1 Prosedur Reviu laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, diketahui bahwa prosedur reviu laporan keuangan dapat diperlihatkan sebagai berikut :



MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

5.1.1 Perencanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

a. Memahami Entitas Pelaporan

Pada tahap ini, bagian Inspektorat melakukan pemahaman terhadap latar belakang dan sifat dari lingkungan operasional entitas pelaporan, pemahaman terhadap proses transaksi yang signifikan, serta pemahaman terhadap prinsip dan metode akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan entitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengumpulkan berita-berita berkaitan dengan entitas, termasuk peraturan perundangan yang terkait, mempelajari kebijakan-kebijakan Gubernur/Bupati/Walikota tentang sistem dan prosedur pelaporan keuangan, membaca laporan keuangan dan hasil reviu entitas dari periode sebelumnya serta informasi terkait lainnya.

b. Memilih Daftar Pertanyaan Reviu Sistem Pengendalian Intern Yang Cocok

Pada tahap ini, pihak Inspektorat selaku pihak yang berwenang dalam melakukan reviu melakukan pemilihan terhadap daftar pertanyaan yang akan diajukan terhadap PPKD. Hal ini dilakukan untuk mempermudah bagian Inspektorat dalam menilai Sistem Pengendalian Intern yang telah diterapkan oleh PPKD.

c. Merancang Atau Memodifikasi Program Kerja Reviu

Tahapan akhir dalam proses perencanaan reviu ini adalah merancang atau memodifikasi program kerja reviu. Hal ini dilakukan agar reviu yang dilakukan mempunyai panduan sehingga pelaksanaan reviu lebih terarah.

Dalam tahapan ini, pihak Inspektorat melakukan beberapa hal diantaranya, mendapatkan laporan keuangan, mendapatkan laporan hasil audit yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern maupun oleh pihak ekstern, memastikan bahwa pengklasifikasian, pengukuran dan pengungkapan akun pada laporan keuangan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, serta melakukan analisis atas hasil langkah-langkah kerja yang telah dilakukan sebagai dasar dalam memberikan pernyataan reviu.

5.1.2 Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pelaksanaan Reviu dilakukan oleh Inspektorat secara paralel dengan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu tersebut dilaksanakan pada tanggal 22 Maret s/d 16 April. Kegiatan-kegiatan dalam proses pelaksanaan tersebut meliputi penelusuran angka, permintaan keterangan dan prosedur analitis. Sebelum ketiga kegiatan tersebut di atas dilaksanakan, dilakukan persiapan berupa pengumpulan informasi keuangan, laporan keuangan yang telah diaudit pada tahun lalu, laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan, kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan serta informasi lain yang diperlukan. Kemudian dilanjutkan dengan pembentukan tim reviu yang mempunyai kemampuan teknis yang memadai.

a. Penelusuran Angka

Dalam melaksanakan reviu, Inspektorat perlu menelusuri angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan ke buku atau catatan-catatan yang digunakan untuk meyakini bahwa angka-angka tersebut benar.

Pelaksanaan teknik penelusuran angka dilakukan dengan menelusuri angka-angka yang ada pada laporan keuangan yang disusun oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan laporan Keuangan yang disusun oleh Dinas Pengelolaan Pendapatan dan Aset Daerah (DPPKD). Dinas Inspektorat akan melihat apakah angka-angka yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

b. Permintaan Keterangan

Permintaan keterangan dilakukan jika dalam proses penelusuran angka terdapat hal-hal yang perlu dikonfirmasi kepada pihak – pihak yang berkompeten. Hal ini dilakukan oleh Inspektorat dengan cara tertulis (Kuesioner) dan lisan (wawancara) kepada pihak – pihak yang relevan.

c. Prosedur Analitis

Prosedur Analitis dirancang untuk mengidentifikasi adanya hubungan antar akun dan kejadian yang tidak biasa serta tidak sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Analisis yang dilakukan adalah menilai kewajaran saldo dan rincian laporan keuangan, kesesuaian dan keterkaitan antar komponen laporan keuangan yang satu dengan komponen lainnya.

Untuk mendokumentasikan pelaksanaan revidi diatas, Inspektorat menyiapkan kertas kerja revidi. Kertas kerja revidi menilai kesesuaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan revidi Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

5.1.3 Pelaporan Hasil Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Pada tahap ini, Inspektorat melakukan pelaporan atas reviu yang telah mereka lakukan kedalam suatu laporan yang disebut Laporan Hasil Reviu (LHR). Berikut ringkasan Laporan Hasil Reviu Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2009

1. Pernyataan telah direviu
2. LHR disajikan dalam bentuk surat yang intisarinya memuat :
 - a. Pernyataan reviu
 - b. Komentar dan informasi tambahan, yaitu :
 - Pernyataan reviu
 - Dasar reviu
 - Waktu pelaksanaan reviu
 - Susunan anggota reviu
 - Tujuan dan sasaran reviu
 - Ruang lingkup reviu
 - Simpulan dan rekomendasi
 - Penilaian pengendalian intern Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)
 - Keandalan Laporan Keuangan dan Kinerja (LKK) dan kesesuaian dengan SAP
 - Tindak lanjut hasil reviu sebelumnya

Lampiran :

- a. Program kerja reviu

- b. Kertas Kerja reuiu

5.2 Opini dan Temuan Pemeriksaan BPK

Opini BPK atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009 adalah wajar dengan pengecualian. Pemberian opini wajar dengan pengecualian pada kabupataten Lima Puluh Kota disebabkan oleh hal – hal sebagai berikut :

1. Terdapat penerimaan Dana Kapitalisasi Askes dan Jamkesmas yang tidak dicatat sebagai Pendapatan Daerah dan dikelola secara langsung untuk belanja operasional RSUD Suliki dan 20 Puskesmas sebesar Rp. 2.425.698.586,00. Penerimaan tersebut digunakan secara langsung untuk belanja operasional RSUD dan 20 Puskesmas sebesar Rp. 2.425.698.586,00. Hal tersebut mengakibatkan kurang saji (understated) atas realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan Realisasi Barang dan Jasa pada LRA.
2. Terdapat belanja pegawai bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 181.000.000,00 yang seharusnya dibebankan kedalam Belanja Bantuan Sosial karena merupakan bantuan untuk anak yatim dan keluarga miskin yang diberikan secara tunai. Hal tersebut menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja pegawai sebesar tersebut diatas.
3. Terdapat belanja barang dan jasa pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp. 120.000.000,00 yang seharusnya dibebankan kedalam belanja bantuan sosial karena merupakan bantuan untuk mesjid – mesjid yang diberikan secara tunai. Hal tersebut

menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja barang dan jasa sebesar tersebut diatas.

4. Terdapat belanja modal tanah pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikura sebesar Rp. 1.599.097.400,00 yang seharusnya dibebankan kedalam belanja Barang dan Jasa karena tidak menambah Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja modal tanah sebesar tersebut diatas.
5. Terdapat belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp. 318.636.000,00 yang direalisasi untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan kedalam belanja hibah karena tidak menambah aset gedung dan bangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja modal gedung dan bangunan sebesar tersebut diatas.
6. Terdapat belanja jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp. 1.029.717.400,00 yang direalisasikan untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan kedalam belanja hibah karena tidak menambah aset jalan, irigasi, dan jaringan pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebesar tersebut diatas.
7. Terdapat belanja aset tetap lainnya berupa pengandaan bibit dan tanaman pada Dinas Kehutanan sebesar Rp. 838.408.000,00 yang direalisasikan

untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan kedalam belanja barang dan jasa karena tidak menambah aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut menyebabkan lebih saji (overstated) pada belanja modal aset tetap lainnya sebesar tersebut diatas.

5.3 Analisis Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Pemda KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dapat dilihat bahwa prosedur reviu yang dilakukan oleh Inspektorat masih memiliki banyak kekurangan, jika ditinjau dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Kekurangan itu dapat dilihat pada proses perencanaan reviu, pada perencanaan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA tidak ada membuat table penilaian Sistem Pengendalian Intern untuk melihat resiko apa yang timbul akibat tidak adanya sistem pengendalian inter yang baik serta sesuai dengan yang ditetapkan oleh Permendagri Nomor 4 tahun 2008.

Kelemahan sistem pengendalian intern mengakibatkan resiko salah saji menjadi besar. Sehingga tujuan dari reviu laporan keuangan, menyajikan informasi yang handal tidak tercapai. Kelemahan SPI dapat dilikat dari beberapa pertanyaan yang penulis ajukan kepada pihak Inspektorat, selaku Aparat Pengendalian Intern Pemerintah (APIP) dan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) tentang beberapa sistem pengendalian intern yang tidak

diungkapkan oleh inspektorat pada daftar pertanyaan reviu sistem pengendalian intern.

No	URAIAN	YA	TIDAK
1	Apakah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah selesai disusun oleh PPKD sebelum Inspektorat melakukan reviu ?		√
2.	Apakah telah dilakukan pemeriksaan untuk 1 (satu) tahun pada setiap SKPD ?		
3.	Apakah persediaan telah dihitung pada akhir tahun melalui cek fisik, sesuai dengan UU no 24 tahun 2005 ?		√
	Kalau jawabannya ya,	√	
	a. Apakah dipantau oleh Inspektorat ?		√
	b. Apakah ada laporan ke inspektorat ?		√
4	Apakah dilakukan pisah batas terhadap transaksi yang ada disetiap SKPD? sesuai dengan lampiran permendari 04 tahun 2008		
	Kalau jawabannya ya,	√	
	a. Apakah dipantau oleh Inspektorat ?		√
	b. Apakah ada laporan ke inspektorat ?		√
5	Apakah bendahara pengeluaran di setiap SKPD melaporkan SPJ nya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Permendagri no 13 tahun 2006 pasal 220 ?		√

Kesimpulan :

Berdasarkan jawaban dari pertanyaan diatas, bahwa dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Inspektorat masih lemah.

Sebelum dilakukan reviu oleh Inspektorat, LKPD seharusnya telah selesai dibuat oleh PPKD, sehingga penusuran angka – angka dapat dilakukan dengan baik. Penelusuran angka merupakan bagian dari pelaksanaan reviu sebelum dilakukan permintaan keterangan dan prosedur analisis.

Inspektorat semestinya juga melakukan pemeriksaan untuk 1 (satu) tahun anggaran kepada setiap SKPD, sebelum dilakukan reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan karena keterbatasan sumberdaya, sehingga pemeriksaan disetiap SKPD baru dapat dilakukan untuk beberapa bulan anggaran saja.

Persediaan mungkin telah dihitung melalui cek fisik setiap akhir tahun oleh SKPD tetapi tidak adanya pantauan dan laporan kepada inspektorat, sehingga keakuratan data diragukan. Hal yang sama terjadi pada pisah batas terhadap transaksi yang ada di setiap SKPD.

Selain itu dalam proses pelaksanaan reviu laporan keuangan, Inspektorat tidak membuat Kertas Kerja Reviu (KKR) yang lengkap dan rapi. Pelaksanaan reviu ini dituangkan dalam KKR sebagai pertanggung-jawaban bahwa langkah kerja reviu telah dilaksanakan, sekaligus menjadi dokumentasi pelaksanaan reviu. Kualitas hasil reviu akan lebih terjamin jika didukung oleh KKR yang baik.

KKR yang dibuat oleh tim reviu memiliki beberapa kekurangan. Diantaranya, KKR tidak mencantumkan nomor reviu, nama pembuat KKR, nama yang melakukan reviu dan instansi yang direviu. Disamping itu, kuesionel hanya diberikan kepada PPKD, semestinya tim reviu juga melakukan reviu ke SKPD.

Untuk mengetahui bahwa laporan keuangan telah disusun berdasarkan sistem

pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan SAP.

Simpulan hasil revidu menyatakan bahwa hasil revidu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2009 dengan menggunakan prosedur analitis yang meliputi kesesuaian dalam penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, penilaian, pengklasifikasian maupun penyajian, maka tim revidu menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tahun anggaran 2009 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak perlu melakukan modifikasi-modifikasi yang materil terhadap laporan keuangan yang telah disusun tersebut.

Hasil revidu semestinya menjawab tujuan revidu. Adapun tujuan revidu menurut permendagri 04 tahun 2008 adalah : “memberikan keyakinan terbatas bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Sedangkan dalam hasil revidu tidak dicantumkan bahwa laporan keuangan disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum revidu dengan LKPD setelah direvidu hasilnya sama, tetapi LKPD setelah revidu dengan LKPD setelah diaudit menghasilkan data yang berbeda. Ada beberapa perbedaan yang penulis temukan dalam kedua LKPD tersebut. Diantaranya persediaan dineraca tahun 2009 setelah direvidu menunjukan angka Rp. 4.239.826.520,00 namun setelah audit angkanya menunjukan Rp. 5.078.234.520,00. Hal ini disebabkan data persediaan yang diberikan oleh SKPD tidak handal.

Hasil temuan BPK sebenarnya bisa dihindari oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, jika Inspektorat melaksanakan fungsinya sebagai Aparat Pengendalian Intern (APIP) dan revidu dapat dilaksanakan dengan baik. Dalam

melaksanakan reviu, pemahaman terhadap jenis biaya mestilah dipahami dengan baik oleh tim reviu.

Hal – hal berikut yang perlu diperhatikan oleh Inspektorat :

1. Penerimaan SKPD dilarang digunakan langsung untuk membiayai pengeluaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Penerimaan SKPD berupa uang atau cek harus disetor ke rekening kas umum daerah paling lama 1 (satu) hari kerja.
3. Termasuk Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
4. Termasuk Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.
5. Termasuk Belanja Barang adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.
6. Termasuk Belanja Modal adalah : digunakan untuk pengeluaran yang

dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

7. Termasuk Hibah adalah pengeluaran pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan,

5.4 Kendala-kendala Dalam Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Pada Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, pihak Inspektorat menemukan beberapa kendala. Kendala-kendala dalam melaksanakan kegiatan reviu laporan keuangan ini antara lain adalah :

- a. Keterlambatan Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyerahkan laporan keuangannya. Sehingga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah juga terlambat menyelesaikan laporan keuangannya. Akibatnya reviu terhadap laporan keuangan tersebut terlambat dilakukan dan tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Reviu semestinya dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, sedangkan inspektor kabupaten melaksanakan pada tanggal 22 Maret 2010 s/d 16 April 2010
- b. Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat banyak yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi. Sehingga kurangnya

pemahaman dari Tim reviu untuk melakukan reviu laporan keuangan daerah. serta kurang pahamnya Inspektorat dalam menyusun laporan keuangan daerah. Pemahaman terhadap pentingnya tanggal kejadian, diabaikan oleh SKPD dibiarkan oleh Inspektorat. Hal ini dapat dilihat dalam laporan surat setoran pajak (SSP) kantor satpol – pp bulan Mei 2009 yang dibayar tanggal 05 juni 2009 dicatat didalam buku kas umum tanggal 31 Mei 2009. tidak menunjukkan tanggal yang sebenarnya yang ditulis dalam buku kas umum. Hal ini tidak sesuai dengan Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia

- c. Kurang pahamnya SKPD dalam menyusun laporan keuangan, ini terlihat dari utang PFK yang dibayar setelah tahun 2009, dicatat telah dibayar tahun 2009.
- d. Sistem pengendalian intern yang lemah, seperti :
 - Daftar persediaan dan aktiva tetap yang tidak handal, karena tidak adanya stock opname. Hal ini tidak sesuai dengan PSAP No 5 (Akuntansi Persediaan) : "pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik."
 - Pisah batas terhadap transaksi tidak dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Reviu merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) kepada Kepala Daerah. Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA sebagai suatu daerah otonomi, juga harus menyusun laporan keuangannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Keuangan yang mana laporan keuangan ini nantinya akan direviu oleh Inspektorat.

Setelah melakukan penelitian terhadap reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA ini, penulis menarik beberapa kesimpulan :

- a. Bentuk reviu yang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 itu terdiri dari landasan hukum yang menjelaskan dasar hukum yang mengatur tentang reviu laporan keuangan, tujuan reviu laporan keuangan yang menjelaskan tujuan melakukan reviu terhadap laporan keuangan, sasaran reviu laporan keuangan, ruang lingkup laporan keuangan, simpulan dan rekomendasi yang memuat kesimpulan dari reviu laporan keuangan tersebut dan merekomendasikan temuan-temuan dari reviu tersebut, serta tindak lanjut hasil reviu yang menjelaskan tindakan yang akan diambil untuk mengatasinya.

- b. Hasil revidu yang dilakukan oleh Inspektorat tidak menghasilkan rekomendasi perbaikan bagi Inspektorat dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Lima Puluh Kota sebelum dan sesudah revidu sama.
- c. Pelaksanaan revidu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah KABUPATEN LIMA PULUH KOTA memiliki beberapa kekurangan, dimana penulisan angka - angka sulit dilakukan karena Laporan Keuangan Daerah (LKPD) belum selesai dibuat sebelum tim revidu melakukan revidu.
- d. Dalam melaksanakan revidu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, Inspektorat mengalami kendala-kendala seperti:
- Keterlambatan Satuan-satuan Kerja Perangkat Daerah menyerahkan laporan keuangannya. Sehingga Pejabat Pengelola Keuangan Daerah juga terlambat menyelesaikan laporan keuangannya. Akibatnya revidu terhadap laporan keuangan tersebut terlambat dilakukan dan tidak bisa diselesaikan tepat pada waktunya.
 - Sumberdaya manusia yang dimiliki oleh Inspektorat kebanyakan bukan orang-orang dengan latar belakang ilmu akuntansi.
 - Sistem pengendalian intern yang lemah

6.2 Saran

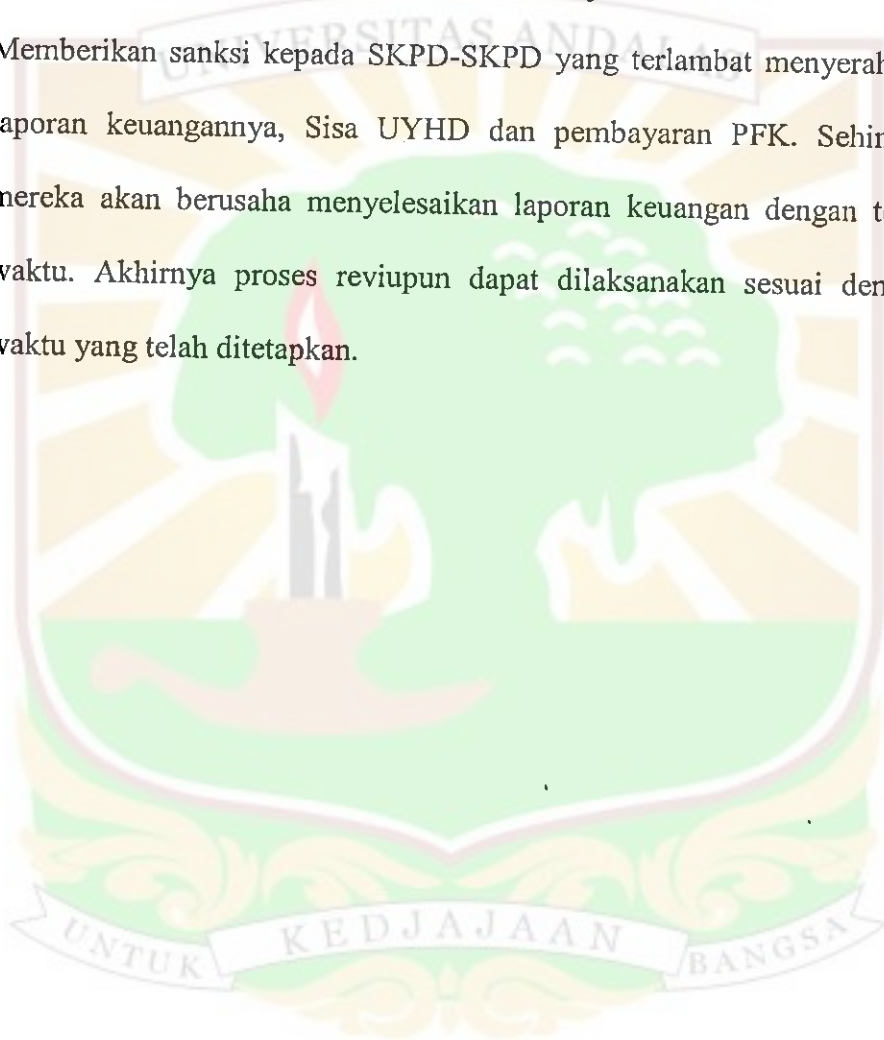
- a. Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA diharapkan lebih memahami prosedur dan bentuk dari revidu serta isi hasil dari revidu yang dilakukannya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
- b. Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA melakukan sistem

pengendalian intern yang memadai, seperti :

- Melakukan pemantauan stock opname setiap akhir tahun
- Melakukan pemantauan pisah batas transaksi

sehingga salah saji dapat diminimalisir.

- c. Inspektorat KABUPATEN LIMA PULUH KOTA diharapkan lebih memahami SAP khususnya jenis – jenis belanja.
- d. Memberikan sanksi kepada SKPD-SKPD yang terlambat menyerahkan laporan keuangannya, Sisa UYHD dan pembayaran PFK. Sehingga mereka akan berusaha menyelesaikan laporan keuangan dengan tepat waktu. Akhirnya proses reviupun dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.



DAFTAR PUSTAKA

- Bagian keuangan SBB sosialisasi Permendagri nomor 13. www.balagu.com. 16 Agustus 2006.*
- Bambang Tri Darmawan, SE. *Ak Tarakan Internal Auditor*. www.Auditortrk.blogspot.com. 20 Januari 2009
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2003.
- Mardiasmo, 2001, *Akuntansi Sektor Publik*. Andi, Yogyakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 tahun 2008. *Pedoman Pelaksanaan Review Atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005. *Standar Akuntansi Pemerintah*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2008. *Lampiran I. Perencanaan Review Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. 17 januari 2008.
- Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000, *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*
- Widodo Amd, dkk. *Kamus Ilmiah Populer*. Yogyakarta: Absolut, 2001.
- Bastian, Indra, 2006, *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Halim, Abdul, 2004, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Jakarta, Salemba Empat.
- Harahap, Sofyan S, 2003, *Teori Akuntansi*, Edisi Revisi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Nordiawan, Deddi, 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Jakarta, Salemba Empat.
- Hafiz, Abdul T, 2007, *Akuntansi Pemerintahan Daerah*, Bandung, Alfabeta.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI

Nama : Media Purnama
Tempat / Tanggal Lahir : Payakumbuh / 22 Desember 1981
Jenis Kelamin : Pria
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Batang Tabit, Payakumbuh

PENDIDIKAN FORMAL

1. SDN 01 Payakumbuh Timur (1988-1994)
2. SLTP 3 Payakumbuh (1994-1997)
3. SMUN 2 Payakumbuh (1997-2000)
4. Universitas Andalas Fakultas Ekonomi Program DIII
Jurusan Akuntansi (2000-2003)
5. Universitas Andalas Fakultas Ekonomi Ekstensi
Jurusan Akuntansi (2008-2011)

Demikianlah daftar riwayat hidup ini di buat dengan sesungguhnya.

Padang, Juni 2011

(Media Purnama)

INSPEKTORAT

JL. PROF. MOHD. YAMIN, SH NO. 51 TELP (0752) 93903

KEL. PAYOBADAR – PADANG TANGAH – KEC. PAYAKUMBUH TIMUR - PAYAKUMBUH

Nomor : 700/06/Insp-KHS/2010
Tanggal : 13 April 2010
Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Hasil Reviu Laporan Keuangan
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Tahun Anggaran 2009

Yth. Bapak Bupati Lima Puluh Kota

di

Sarilamak

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Keuangan berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tanggal 31 Desember 2009 untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang terkait, dengan hasil sebagai berikut:

A. Pernyataan Reviu

Kami telah mereviu Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota berupa Neraca untuk tanggal 31 Desember 2009, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Reviu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Reviu terutama mencakup penelusuran angka, permintaan keterangan kepada pejabat, entitas pelaporan, pejabat pengelolaan keuangan daerah dan prosedur analitis yang diterapkan atas data keuangan. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberikan pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat penyebab yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan diatas tidak disajikan berdasarkan sistem pengendalian yang memadai dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

B. Dasar Reviu

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah; dan
3. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 700/32/Insp-KHS/2010 tanggal 22 Maret 2010.

C. Waktu Pelaksanaan Reviu

Reviu dilaksanakan dari tanggal 22 Maret sampai dengan 16 April 2010

D. Susunan Anggota Tim

- ❖ Kasman Kasim,SH,MH : NIP.19591014 198212 1 001 : Penanggung Jawab
- ❖ Ir. Tristianto : NIP.19640327 199303 1 005 : Ketua Tim
- ❖ Kasmawati,SH : NIP.19600204 198603 2 005 : Anggota Tim
- ❖ Lasidi,S.Pd : NIP.19610215 198403 1 002 : Anggota Tim
- ❖ Sarnerlli,S.Sos : NIP.19740102 199303 2 001 : Anggota Tim
- ❖ Debby Seprima,SE : NIP.19750901 200701 2 003 : Anggota Tim
- ❖ Yusrizal,SE.Ak : NIP.19750415 200803 1 001 : Anggota Tim

E. Tujuan dan Sasaran Reviu

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Sasaran reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan oleh PPKD. Laporan keuangan yang dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

F. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan keandalan sistem pengendalian intern dalam penyajian laporan keuangan, dan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

G. Simpulan dan Rekomendasi

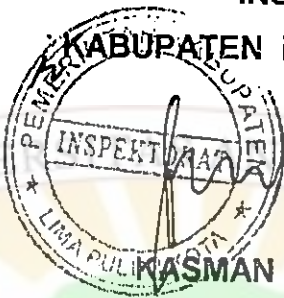
1. Tim reviu telah melaksanakan penilaian sistem pengendalian internal atas pelaksanaan sistem akuntansi dengan tujuan untuk mengidentifikasi adanya risiko salah saji materil informasi keuangan dalam laporan keuangan yang disajikan yang meliputi informasi keuangan yang disajikan telah akurat dengan melakukan perbandingan aset tetap dengan aset lainnya antara Bagian Akuntansi dengan Bagian Barang Pemda dan telah diyakini bahwa angka aset dalam Neraca sesuai dengan aset sebenarnya pada pengelola barang.
2. Untuk keamanan aset (data/informasi keuangan) terjaga dengan baik, tim reviu telah membandingkan saldo awal pos-pos laporan keuangan dengan saldo akhir periode sebelumnya dan hasilnya sesuai.
3. Tim Reviu telah melaksanakan Penelusuran Angka dalam Laporan Keuangan konsolidasi yang telah disajikan menurut SAP pada Laporan Keuangan Konsolidasi yang belum dikonversi (yang menggunakan struktur Permendagri No. 13 Tahun 2006) dan hasilnya diyakini angka-angka tersebut sudah benar.
4. Berdasarkan hasil reviu terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2009 dengan menggunakan prosedur analitis yang meliputi kesesuaian dalam penerapan prinsip pengakuan, pengukuran, penilaian, pengklasifikasian maupun penyajian, maka tim reviu menyimpulkan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2009 telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak perlu melakukan modifikasi-modifikasi yang materil terhadap laporan keuangan yang telah disusun tersebut.

H. Tindak Lanjut Hasil Reviu Sebelumnya

Hasil Tindak Lanjut Reviu sebelumnya telah dilaksanakan.

INSPEKTUR

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



KASMAN KASIM, SH, MH

Pembina Utama Muda/NIP.19591014 198212 1 001



PROGRAM KERJA REVIU

No.	Langkah Kerja Reviu	Teknik Reviu	Sumber Data	Pelaksana	Waktu Pelaksanaan
1.	Dapatkan Laporan Keuangan (Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan) dan LBMD (Laporan Barang, Catatan Ringkasan Barang Milik Daerah, Laporan Kondisi Barang).		LK LBMD	<ul style="list-style-type: none"> Ir. Tristianto Lasidi, S.Pd Kasmwati, SH Sarnelli, S.Sos Debby Seprima, SE Yusrizal, SE.Ak 	23 Maret s/d 16 April 2010
2.	Pastikan bahwa neraca awal Pemerintah Daerah sama dengan neraca audited tahun sebelumnya.	Analitis	LK LBMD	sda	
3.	Pastikan bahwa laporan aset tetap dan aset lainnya antar Laporan Akuntansi sama dengan Laporan Pengelolaan Barang/Aset.	Analitis	LK LBMD	sda	
4.	Pastikan bahwa Pengklasifikasian, Pengukuran, Pengungkapan akun pada Neraca, LRA dan LAK telah disusun sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintah (SAP).	W/K Analitis	LK LHP	Sda	
5.	Lakukan analisis atas hasil langkah kerja diatas untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai dasar memberi pernyataan reviu.	Analitis		sda	

Payakumbuh, 22 Maret 2010

Ketua Tim



Ir. TRISTIANTO

NIP.19640327 199303 1 001

KERTAS KERJA REVIU (analitik)
PERBANDINGAN ASET TETAP DAN ASET TETAP LAINNYA
BAGIAN AKUNTANSI DENGAN BAGIAN BARANG
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan Reviu: Untuk meyakini angka aset dalam neraca sesuai dengan aset sebenarnya yang dikelola bagian barang.

Perkiraan	Pengelola Barang	Bagian Akuntansi	Selisih
1	2	3	4
ASET			
ASET TETAP			
Tanah	63,939,480,461,00	63,939,480,461,00	-
Peralatan dan Mesin	115,914,264,393,50	115,914,264,393,50	-
Gedung dan Bangunan	501,873,887,957,00	501,873,887,957,00	-
Jalan, Irigasi dan Jaringan	435,446,469,909,00	435,446,469,909,00	-
Konsultasi dalam Pengerjaan	24,129,255,608,00	24,129,255,608,00	-
Aset Tetap lainnya	17,993,830,213,00	17,993,830,213,00	-
<i>Jumlah Aset Tetap</i>	<i>1,159,297,188,541,50</i>	<i>1,159,297,188,541,50</i>	-
ASET LAINNYA			
Aset lain-lain	19,229,971,539,79	19,229,971,539,79	-
<i>Jumlah Aset Lainnya</i>	<i>19,229,971,539,79</i>	<i>19,229,971,539,79</i>	-
<i>Jumlah Aset Tetap Dan Aset Lainnya</i>	<i>1,178,527,160,081,79</i>	<i>1,178,527,160,081,79</i>	-



KERTAS KERJA REVIU (analitik)
PERBANDINGAN SALDO AKHIR NERACA (AUDITED BPK) DENGAN SALDO AWAL (UNAUDITED)
PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Tujuan Reviu : Untuk meyakinkan saldo awal Neraca yang akan direviu adalah saldo Neraca Audited tahun sebelumnya

Perkiraan Neraca	Audited BPK *) (31 Desember 2008) Rp	Neraca Un-Audited (1 Januari 2009) Rp	Selisih Rp	Penjelasan
(1)	(3)	(4)	(5)-(3)-(4)	(5)
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	33,590,477,256.56	33,590,477,256.56		
Kas di Bendahara Pengeluaran	8,826,965,445.00	8,826,965,445.00		
Kas di Bendahara Penerimaan	24,363,259.00	24,363,259.00		
Piutang Pajak	1,158,238,933.00	1,158,238,933.00		
Piutang Retribusi	22,418,000.00	22,418,000.00		
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	4,066,136,570.00	4,066,136,570.00		
Piutang Lainnya	76,500,000.00	76,500,000.00		
Persediaan	6,421,087,980.78	6,421,087,980.78		
Jumlah Aset Lancar	54,186,187,444.34	54,186,187,444.34		
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen				
Investasi Non Permanen Lainnya	737,375,000.00	737,375,000.00		
Jumlah Investasi Non Permanen	737,375,000.00	737,375,000.00		
Investasi Permanen				
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	8,619,604,102.00	8,619,604,102.00		
Jumlah Investasi Permanen	8,619,604,102.00	8,619,604,102.00		
Jumlah Investasi Jangka Panjang	9,356,979,102.00	9,356,979,102.00		
ASET TETAP				
Tanah	61,879,849,461.00	61,879,849,461.00		
Peralatan dan Mesin	100,657,395,513.50	100,657,395,513.50		
Gedung dan Bangunan	448,701,345,456.00	448,701,345,456.00		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	409,896,971,509.00	409,896,971,509.00		
Aset Tetap Lainnya	16,970,331,213.00	16,970,331,213.00		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4,389,571,100.00	4,389,571,100.00		
Jumlah Aset Tetap	1,042,495,464,252.50	1,042,495,464,252.50		
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	0	0		
Jumlah Dana Cadangan	0	0		
ASET LAINNYA				
Tagihan Penjualan Angsuran	0	0		
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Gan	0	0		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0		
Aset Lainnya	19,229,971,539.79	19,229,971,539.79		
Jumlah Aset Lainnya	19,229,971,539.79	19,229,971,539.79		
TOTAL ASET	1,125,268,602,338.63	1,125,268,602,338.63		

KERTAS KERJA REVIU KESESUAIN DENGAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2009
PEMERINTAH DAERAH

NO.	URAIAN	PENGUKURAN		STATUS	PENGKLASIFIKASIAN		STATUS	PELAPORAN		STATUS	PENJELASAN
1	2	LK	SAP&PL	3	LK	SAP & PL	4	LK	SAP & PL	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH										
	a. Pendapatan Perpajakan	kas diterima	kas diterima	S	Pendapatan	Pendapatan	S	Bulanan	Bulanan	S	
	B. Pendapatan Negara Bukan Pajak	kas diterima	kas diterima	S	Pendapatan	Pendapatan	S	Bulanan	Bulanan	S	
	c. Hibah	kas diterima	kas diterima	S	Pendapatan	Pendapatan	S	Bulanan	Bulanan	S	
B	BELANJA NEGARA										
	Belanja pegawai	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Belanja Barang	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Belanja Modal	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Pembayaran Bunga Utang	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Subsidi	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Hibah	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Bantuan Sosial	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	
	Belanja Lain-lain	kas dibayar	kas dibayar	S	Belanja	Belanja	S	Bulanan	Bulanan	S	

Keterangan:

LK= Laporan Keuangan Pemda

SAP&PL=Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Perundangan lain yang berlaku

S=Sesuai

SP=Sesuai tetap diperlukan penyempurnaan lebih lanjut

TS=Tidak Sesuai

(Nama Instansi)

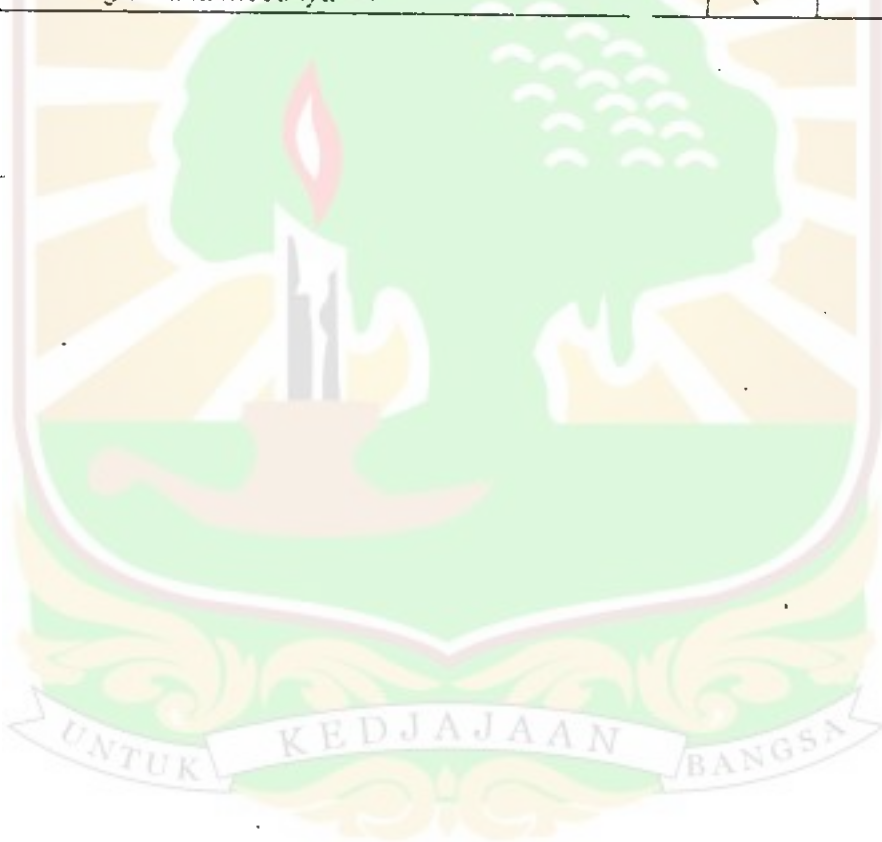
(Aparat Pengawasan Intern)

KKR Nomor
Dibuat oleh
Tanggal/Paraf
Direviu oleh

**DAFTAR PERTANYAAN
REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENERIMAAN KAS**
SKPKD(Permndagri 13)

No	Uraian	Ya	tidak
1	Apakah Kepala Daerah telah menetapkan:		
	a. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah;	✓	
	b. Pejabat yang diserahi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Unit Kerja Pengguna Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara penerimaan dan Bendahara penerima pembantu	✓	
	c. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pendapatan APBD.	✓	
	d. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat bukti dasar pemungutan pendapatan Daerah (PPKD)		
	Apakah rekening Kas Daerah dibuka pada Bank yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah?	✓	
	Apakah orang yang bisa mengakses Rek. Kas Daerah adalah orang yang sudah tercantum dalam surat keputusan kepala daerah?		
	Apakah ada pemisahan rekening antara rekening penerimaan dengan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan kepala daerah?	✓	
	Apakah telah dilakukan rekonsiliasi saldo kas daerah di rekening bank dengan buku kas umum daerah secara periodik?	✓	
	Apakah bukti setor penerimaan melalui bank telah dicatat seluruhnya sesuai dengan jenis penerimaan?note:apakah ini perlu ditanya di BUD nya?		
	Apakah penerimaan uang di kas daerah telah direkonsiliasi dengan laporan harian penerimaan dari bendahara penerimaan?		
	Apakah tembusan bukti-bukti setoran telah dibubuhi cap oleh bank, diterima dan dicatat oleh bagian pembukuan?	✓	
	Apakah salinan rekening koran bank, buku kas umum, buku besar penerimaan dan catatan akuntansi lainnya telah disimpan dengan arsip?	✓	
	Apakah semua penerimaan telah dibukukan dalam Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per rincian objek penerimaan?		
	Apakah laporan bulanan penerimaan dinas/kantor/badan telah diterima SKPD?		
	Apakah bank yang ditunjuk sebagai tempat rekening Kasda, selalu mengirimkan nota kredit sebagai pemberitahuan atas setiap setoran yang diterimanya? (Sl: 900 poin 5.1.1 dan 5.3.5)		

Apakah Bendahara penerimaan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan (secara administratif) kepada PA/Kuasa PA melalui PPK-SKPD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?				Atas nama Bendahara PA
Apakah Bendahara penerimaan telah menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan (secara fungsional) kepada PPKD selaku BUD, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya?				Atas nama Bendahara PA
Apakah laporan pertanggungjawaban bulanan PPKD selaku BUD, telah dilampiri dengan Buku Kas Umum, Buku Pembantu per objek penerimaan, Buku Rekapitulasi penerimaan harian, dan bukti penerimaan lainnya?	✓			
Apakah PPKD selaku BUD telah melakukan rekonsiliasi penerimaan dengan melakukan verifikasi, evaluasi, dan analisis atas laporan pertanggungjawaban bulanan?	✓			
Apakah penerimaan hasil investasi jangka pendek maupun jangka panjang telah dicatat sebagaimana mestinya	✓			



Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

KKR Nomor

Dibuat oleh

Tanggal/Paraf 24-11-2016

Direviu oleh

DAFTAR PERTANYAAN
REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGELUARAN KAS (Permendagri 3)
SKPKD

Uraian	Ya	tidak
Apakah Kepala Daerah telah menetapkan:		
1. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Penyediaan Dana (SPD)?	✓	
2. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)?	✓	
3. Pejabat yang diberi wewenang mengesahkan Surat Pertanggungjawaban (SPJ)?	✓	
4. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)?	✓	
5. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani Cek?	✓	
6. Pejabat yang diberi wewenang mengelola penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah serta segala bentuk kekayaan Daerah lainnya, yang selanjutnya disebut Bendahara Umum Daerah?	✓	
7. Pejabat yang diberi tugas melaksanakan kegiatan kebendaharawanan dalam rangka pelaksanaan APBD di setiap Urut Kerja Pengurusan Anggaran Daerah yang selanjutnya disebut Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu?	✓	
8. Pejabat yang diberi wewenang menandatangani ikatan atau perjanjian dengan Pihak Ketiga yang mengakibatkan pengeluaran APBD?	✓	
9. Apakah pejabat yang disebut di atas tidak merangkap sebagai pejabat pengelola keuangan daerah lainnya?		✓
10. Apakah terdapat rekening khusus untuk menampung pengeluaran Pemda?		✓
11. Apakah rekening Kas Daerah perkiraan Bank direkonsiliasikan setidaknya sekali dalam sebulan?		✓
12. Apabila pertanyaan no 4 jawaban "ya", apakah rekening tersebut direkonsiliasi dengan pembukuannya (buku bank pengeluaran) minimal sekali dalam tiga bulan?		
13. Apakah SPD yang diterbitkan telah ditandatangani oleh PPKD?	✓	
14. Apakah pengeluaran kas dilakukan berdasarkan SPD atau dokumen lain yang dipersamakan? ps1 197(1)	✓	
15. Apakah SPM yang diajukan telah didukung dengan dokumen yang lengkap sesuai ps1 216 (3) Permendagri No.13 tahun 2006 ?	✓	
16. Apakah SP2D yang diterbitkan berdasarkan SPM yang telah diverifikasi/diverifikasi oleh kuasa BUD, telah disetujui oleh pejabat bendahara?	✓	

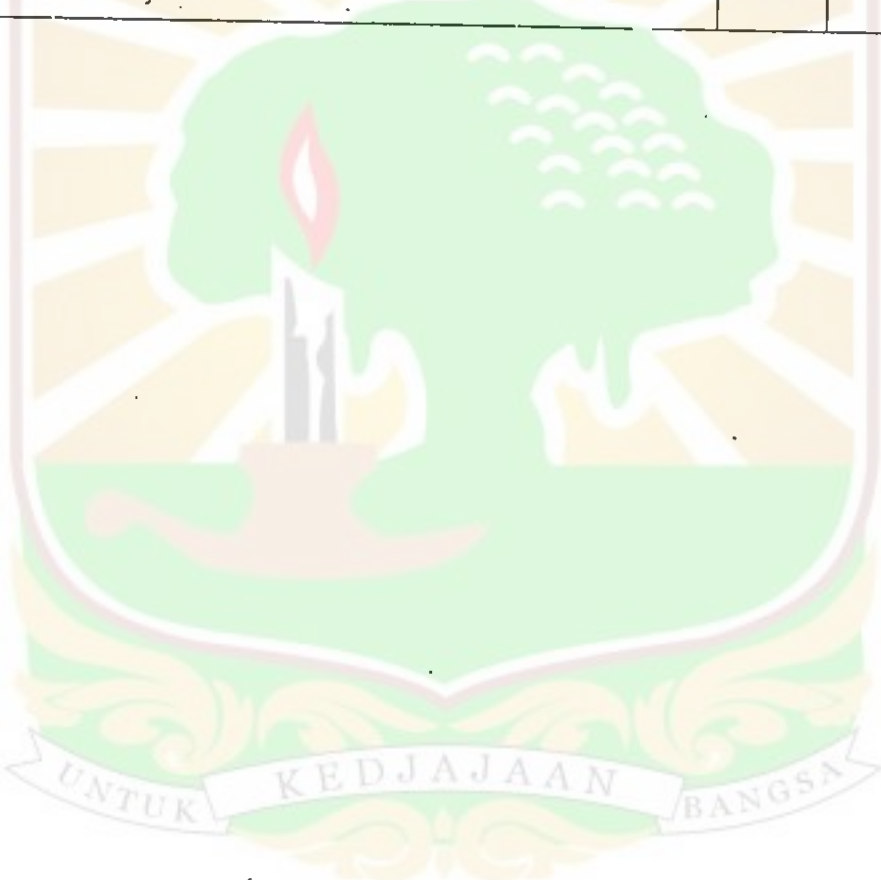
Pemda Kabupaten Lima Puluh Kota

Inspektorat Kabupaten Lima Puluh Kota

KKR Nomor
Dibuat oleh
Tanggal/Paraf
Direviu oleh

DAFTAR PERTANYAAN
REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PENGELUARAN KAS (Fermendagri 13)
SKPKD

No	Uraian	Jawab	
		Ya	tidak
	Apakah dibuat register SP2D?	✓	
1	Apakah Bendahara telah mencatat SP2D pada dokumen penatausahaan yang terdiri dari: BKU Pengeluaran, Buku Pembantu Simpanan Bank, Buku Pembantu Pajak, Buku Pembantu Panjar, dan Buku Rekapitulasi Pengeluaran per Rincian Objek?	✓	



Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
Inspektorat kabupaten Lima Puluh Kota

KKR Nomor :
Dibuat oleh :
Tanggal/Paraf :
Direviu oleh :

DAFTAR PERTANYAAN
REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN
AKTIVA TETAP

Uraian	Ya	tidak	Keterangan
Apakah KepalaBiro/Kepala Bagian Perlengkapan sebagai Pembantu Kuasa barang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang Daerah?			
Bila pertanyaan nomor 1 dijawab "tidak," Apakah ada pejabat yang ditunjuk untuk bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraanpengelolaan barang Daerah?			
Apakah neraca awal pemda sudah disesuaikan dengan Buletin Teknis No.2?			
Apakah pelaksanaan inventarisasi telah berdasarkan atas ketentuan yang berlaku?			
Apakah penambahan aktiva tetap dari Dinas/badan/kantor telah dilaporkan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro atau Kepala Bagian Perlengkapan?			
Apakah laporan penambahan aktiva tetap tersebut didukung dengan Berita Acara pemeriksaan oleh Panitia Pemeriksa Barang Daerah?			
Apakah Panitia Pemeriksa Barang Daerah dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah?			
Apakah pengurangan aktiva tetap dari Dinas/badan/kantor telah diusulkan terlebih dulu kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro atau Kepala Bagian Perlengkapan?			
Apakah pengurangan (penghapusan/penjualan/hibah/kemitraan) aktiva tetap telah dikurangkan dengan SK Kepala Daerah dan atau disetujui DPRD?			
Apakah penambahan/pengurangan aktiva tetap telah dicatat/ dibukukan dalam Daftar Inventaris di biro/bagian perlengkapan dan dibukukan di biro/bagian keuangan?			
Apakah kapitalisasi biaya aktiva tetap telah sesuai dengan kebijakan akuntansinya?			
Apakah buku besar aktiva tetap dilengkapi buku pembantu?			
Bila pertanyaan nomor 12 dijawab "ya" Apakah saldo buku pembantu aktiva tetap cocok dengan saldo perkiraan buku besar secara periodik?			
Apakah telah dilakukan rekonsiliasi antara buku pembantu Aktiva Tetap di Bagian Keuangan dengan Daftar Inventaris di Biro/Bagian Perlengkapan?			

emerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
nspektorat Kabupaten Lima Puluh kota

KKR Nom:
Dibuat ole :
Tanggal/P :
Direviu ole :

DAFTAR PERTANYAAN
REVIU SISTEM PENGENDALIAN INTERN
INVESTASI JANGKA PANJANG :
PERMANEN DAN NON PERMANEN

Uraian	Ya	tidak	Keterangan
Apakah semua dokumen investasi di bawah pengawasan seorang penyimpan?			
Apakah dokumen investasi secara periodik diperiksa dan direkonsiliasi dengan catatan akuntansi?			
Apakah dokumen investasi disimpan dalam kotak yang aman (safety box)?			
Apakah penyimpan dokumen investasi dapat mempengaruhi catatan akuntansi?	✓		
Apakah dokumen investasi dicatat atas nama pemerintah daerah?	✓		
Apakah dokumen investasi disimpan atas dasar alasan keamanan dan oleh orang yang terpisah antara yang menyimpan dan yang mencatat?	✓		
Apakah bagian akuntansi membuat catatan untuk masing-masing investasi?	✓		
Apakah ada akuntansi untuk pendapatan investasi?			
Apakah penjualan investasi secara layak diotorisir?		✓	Tdk terdapat transaksi Penj. investasi

KERTAS KERJA REVIU
Wawancara dan kuesioner
Kesesuaian L/K dengan SAP
SKPKD dan SKPD (Permendagri 13)

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya (Y)	Tidak (T)	
	Umum			
	a. Apakah pemda telah memiliki Perda tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah?	✓		
	b. Apakah pemda telah memiliki Perkada tentang Kebijakan Akuntansi?	✓		
	c. Apakah SKPKD dan SKPD telah melaksanakan sistem dan prosedur untuk pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi?	✓		
	d. Apakah akun buku besar cocok dengan buku pembantu?	✓		
	e. Apakah prinsip akuntansi telah diterapkan secara konsisten?	✓		
	Kas			
	a. Apakah saldo kas di bank telah direkonsiliasi dengan saldo menurut buku?	✓		
	b. Apakah pos yang lama dan tidak normal yang terungkap dalam rekonsiliasi bank telah direviu dan bila perlu dibuatkan penyesuaian?	✓		
	c. Apakah pisah batas (<i>cut off</i>) yang semestinya untuk transaksi kas sudah dilakukan?	✓		
	d. Apakah terdapat pembatasan tertentu terhadap saldo kas daerah?		✓	
	e. Apakah dana kas telah dihitung dan dicocokkan dengan akun kas dalam buku besar?	✓		
	Piutang			
	a. Apakah pengakuan, pengukuran, dan pengklasifikasian piutang telah sesuai dengan SAP?	✓		
	b. Apakah telah dilakukan inventarisasi fisik SKP/SKR atau dokumen lainnya yang menunjukkan adanya piutang?	✓		
	c. Apakah piutang telah diklasifikasikan berdasarkan umurnya?	✓		
	d. Apakah piutang telah diungkapkan dengan cukup?	✓		
	e. Apakah pisah batas (<i>cut off</i>) telah diterapkan dalam penetapan bukti piutang?	✓		
	Persediaan			
	a. Apakah Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau	✓		
	b. kekuasaannya berpindah?			
	c. (PSAP 05 para 14)			
	d. Apakah Persediaan diukur berdasarkan biaya perolehannya, apabila diperoleh dengan pembelian?	✓		
	e. Apakah Persediaan diukur berdasarkan nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan? (PSAP 05 para 18)	✓		
	f. Apakah Persediaan diukur berdasarkan biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri?	✓		
	g. Apakah telah dilaksanakan inventarisasi persediaan?	✓		
	h. Jika sudah, apakah telah dibuat berita acara hasil inventarisasi?	✓		
	i. Jika belum, bagaimana menentukan kuantitasnya dalam laporan keuangan?			
	j. Apakah akun persediaan dalam buku besar telah disesuaikan agar cocok dengan fisik?			
	k. Jika penghitungan persediaan dilakukan pada suatu tanggal selain tanggal neraca, apakah telah dilaksanakan perhitungan mundur (<i>trace back</i>) untuk menentukan posisi persediaan per tanggal neraca?	✓		

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya (Y)	Tidak (T)	
	l. Apakah telah dilakukan penghapusan untuk persediaan yang rusak atau usang?	✓		
	m. Apakah persediaan yang rusak atau usang telah diungkapkan dalam CaLK? (PSAP 05 para 13)	✓		
5	Biaya dibayar dimuka			
	a. Apakah terdapat belanja yang telah dibayarkan yang manfaatnya akan diperoleh pada periode berikutnya, pada tanggal neraca telah dicatat? (Misal: asuransi, sewa)		✓	
6	Aset Tetap			
	z. Apakah aset tetap diakui apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah? (PSAP 07 para 16)	✓		
	b. Apakah Aset tetap dicatat dengan biaya perolehan?	✓		
	c. Jika tidak diperoleh biaya perolehan, apakah digunakan nilai wajar pada saat perolehan?	✓		
	d. Apakah ada kriteria kapitalisasi aset tetap?	✓		
	e. Apakah kriteria tersebut diterapkan secara konsisten selama tahun buku berjalan?	✓		
	f. Apakah pengeluaran untuk pemeliharaan yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi, diklasifikasikan sebagai belanja?			
	g. Apakah dilakukan penyusutan atas aset tetap?		✓	
	h. Apakah Metode dan tarif penyusutan yang digunakan sesuai dengan metode yang berlaku umum?		✓	
	i. Apakah Metode dan tarif depresiasi yang digunakan, dilakukan secara konsisten?		✓	
	j. Apakah penetapan umur ekonomis aset tetap dimuat dalam kebijakan akuntansi? pasal 254 (6)		✓	
	k. Apakah pengelola barang mempunyai perjanjian dalam pemanfaatan aktiva tetap seperti bangun serah guna/bangun guna serah?			
	l. Apakah hal tersebut telah didukung dengan kontrak yang memadai?		✓	
	m. Apakah ada aktiva tetap yang tidak dapat dimanfaatkan tapi masih dicatat sebagai aset?		✓	
	n. Apakah donasi dalam bentuk aset tetap, dicatat sebagai aset pemda?			
	o. Apakah penyerahan aset donasi didukung dengan bukti perpindahan kepemilikan secara hukum, seperti adanya akta hibah? (PSAP 07 para 47)			
8	Aset lainnya			
	Apakah aset yang diklasifikasikan sebagai aset lainnya telah sesuai dengan PSAP 01 paragraf 60?			
9	Kewajiban Jangka Pendek			
	a. Apakah Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul?	✓		
	b. Apakah Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal?	✓		
	c. Apakah utang yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan telah diklasifikasikan sebagai utang jangka pendek?	✓		
	d. Apakah biaya bunga telah dicatat?	✓		
10	Kewajiban Lancar lainnya			
	Apakah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar lainnya? (PSAP 09 para 44)	✓		Umumnya serah guna tidak ada pada pemerintah
11	Kewajiban Jangka Panjang			
	a. Apakah Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima	✓		

No.	Pertanyaan	Jawaban		Keterangan
		Ya (Y)	Tidak (T)	
	dan/atau pada saat kewajiban timbul?			
	b. Apakah Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal?	✓		
	c. Apakah kewajiban telah diklasifikasikan secara tepat sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang?	✓		
	d. Apakah pembatasan yang ada dalam perjanjian pinjaman dipatuhi?	✓		
	e. Apakah kewajiban jangka panjang dijelaskan secara cukup?	✓		
	f. Apakah ada penghapusan utang yang diselesaikan melalui penyerahan aset kas atau non kas dengan nilai utang di bawah nilai tercatatnya? (PSAP 09 para 74)		✓	
	g. Bila ya, apakah nilai tercatat kewajiban telah dikurangi dengan jumlah aset kas atau non kas yang diserahkan?			
	h. Apakah pengurangan nilai tercatat tersebut di atas telah diungkapkan dalam CaLK?			
12	Pendapatan dan Belanja			
	a. Apakah pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening bendahara penerimaan dan diklasifikasikan sesuai dengan SAP?	✓		
	b. Apakah ada penerimaan SKPD yang langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran?		✓	
	c. Apakah pengembalian yang sifatnya normal dan berulang atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan?(PSAP 02 para 27)		✓	
	d. Apakah koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan, dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama?		✓	
	e. Apakah koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut?		✓	
	f. Apakah belanja diakui dalam periode yang tepat dan diklasifikasikan sesuai dengan SAP?	✓		
	g. Apakah pengeluaran (melalui bendahara pengeluaran), diakui pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh SKPKD? (PSAP 02 para 32)	✓		
	h. Apakah laporan keuangan memuat kegiatan yang telah dihentikan atau yang mungkin dikategorikan sebagai pos luar biasa?		✓	
	i. Apakah koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama?	✓		
	j. Apakah koreksi atas pengeluaran belanja yang diterima pada periode berikutnya, dibukukan dalam pendapatan lain-lain?	✓		
13	Lain-lain			
	a. Apakah ada peristiwa setelah akhir tahun buku yang mempunyai pengaruh yang cukup signifikan terhadap laporan keuangan?		✓	
	b. Apakah keputusan rapat yang mempengaruhi laporan keuangan telah dicerminkan?		✓	
	c. Apakah ada ketidakpastian yang material?		✓	
	d. Apakah ada perubahan status dari ketidakpastian yang telah diungkapkan sebelumnya?		✓	

KERTAS KERJA REVIU PROSEDUR ANALITIK

n/Pencatatan

Uraian	S	TS	Penjelasan
T dilakukan pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan punyal nilai/blaya yang dapat diukur dengan andal diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau pengusaannya indah	✓ ✓		
WAJIBAN wajib dilakukan jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi n dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan ubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur wajib dilakukan pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul wajib dicatat sebesar nilai nominal	✓ ✓		
MITAS DANA itas dana lancar dibukukan pada saat pengakuan aset lancar dan kewajiban jangka pendek itas dana Investasi dibukukan pada saat pengakuan investasi jangka panjang, aset tetap, t lainnya, dan kewajiban jangka panjang itas dana cadangan dibukukan pada saat pengakuan dana cadangan	✓ ✓ ✓		

ran

Uraian	S	TS	Penjelasan
ET LANCAR ngukuran atas nilai kas di bendahara pengeluaran dicatat berdasarkan pada nilai ninal ngukuran atas nilai kas di rekening kas daerah dicatat berdasarkan pada al nominal ngukuran atas nilai kas di bendahara penerimaan dicatat berdasarkan pada nilai minal ngukuran atas nilai Investasi jangka pendek dicatat berdasarkan pada nilai olehan ngukuran atas nilai piutang bukan pajak dicatat berdasarkan pada nilai bersih ng dapat direalisasikan ngukuran atas nilai bagian lancar tagihan penjualan/angsuran dicatat berdasarkan da nilai bersih yang dapat direalisasikan ngukuran atas nilai bagian lancar tuntutan ganti rugi dicatat berdasarkan pada ai bersih yang dapat direalisasikan ngukuran atas nilai piutang lainnya dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang nt direalisasikan ngukuran atas nilai persediaan dicatat berdasarkan pada : Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan	✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓		

INVESTASI JANGKA PANJANG

pengukuran atas nilai investasi jangka panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut

pengukuran atas nilai dana bergulir dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan

Uraian	S	TS	Penjelasan
ASET TETAP			
pengukuran atas nilai tanah dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai konstruksi dalam pengerjaan dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
tanah dan konstruksi dalam pengerjaan disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut		✓	Bln minorapikan nilai pengusutan
ASET LAINNYA			
pengukuran atas nilai tagihan penjualan/angsuran dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan	✓		
pengukuran atas nilai tagihan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan	✓		
pengukuran atas nilai kemitraan dengan pihak ketiga dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan	✓		
pengukuran atas nilai aset tak berwujud dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai aset lain-lain dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
WAJIBAN			
wajiban dicatat sebesar nilai nominal	✓		
wajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank Indonesia pada tanggal neraca	✓		Tdk terdapat transaksi Mata Asing
KELOMPOK DANA LANCAR			
pengukuran atas nilai pendapatan yang ditangguhkan dicatat berdasarkan pada nilai nominal	✓		
pengukuran atas nilai cadangan piutang dicatat berdasarkan pada nilai piutang	✓		
pengukuran atas nilai cadangan persediaan dicatat berdasarkan pada biaya perolehan akhir	✓		
KELOMPOK DANA INVESTASI			
pengukuran atas nilai yang diinvestasikan dalam investasi jangka panjang dicatat berdasarkan pada nilai bersih yang dapat direalisasikan	✓		
pengukuran atas nilai yang diinvestasikan dalam aset tetap dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		
pengukuran atas nilai yang diinvestasikan dalam aset lainnya dicatat berdasarkan pada nilai perolehan	✓		

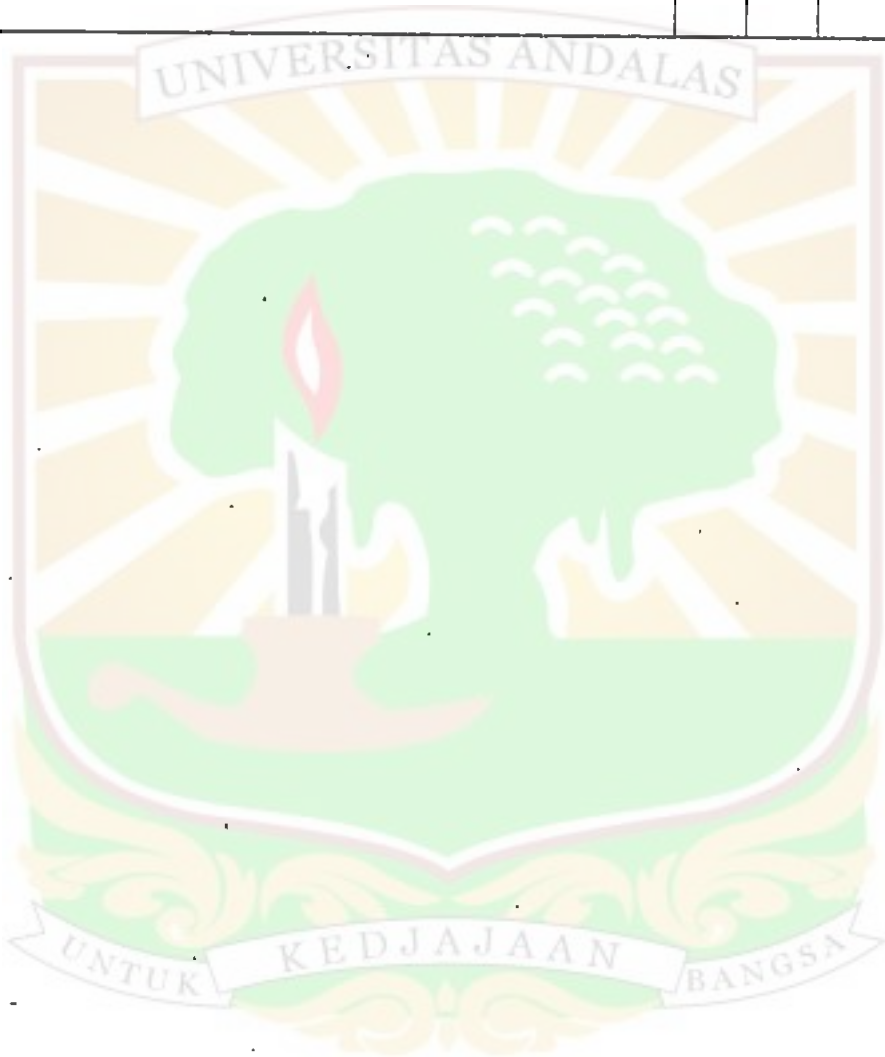
klasifikasi

Uraian	S	TS	Penjelasan
ASET LANCAR			
klasifikasi kas di bendahara pengeluaran berdasarkan kepada jenis aset lancar	✓		
klasifikasi kas di rekening BUD berdasarkan kepada jenis aset lancar	✓		

DISKAPAN

Uraian	S	TS	Penjelasan
klasifikasi pos-pos yang disajikan diungkap dalam catatan atas laporan Keuangan	✓		
nah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek ke kewa	✓		
n jangka panjang karena ada penjadwalan kembali pinjaman jangka panjang			
ngkap dalam catatan atas laporan keuangan			
nyajian kebijakan-kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran	✓		
t serta kewajiban diungkapkan dalam catatan atas Laporan keuangan			

S = Sesuai
 TS = Tidak sesuai



< Nama Instansi >
< Aparat Pengawasan Intern >

KKR Nomor
Dibuat Oleh
Tanggal / Paraf
Direview Oleh
Tanggal / Paraf

KERTAS KERJA REVIU PROSEDUR ANALITIK

Laporan Realisasi Anggaran

1. Pengakuan/Pengukuran

No	Uraian	S	TS	Penjelasan
PENDAPATAN				
1	Pendapatan diakui pada saat diterima pada rekening Kas Umum Daerah	✓		
2	Pendapatan dibukukan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan mencatat penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)	✓		
3	Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan dan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan	✓		
4	Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode sebelumnya	✓		
5	Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut	✓		
TRANSFER				
1	Penerimaan uang berupa dana perimbangan dari Pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah daerah diakui sebagai transfer masuk	✓		
BELANJA				
1	Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah	✓		
2	Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggung jawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan	✓		
TRANSFER				
1	Pengeluaran uang berupa dana perimbangan oleh Pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah diakui sebagai transfer keluar	✓		
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah	✓		
2	Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah	✓		
SURPLUS/DEFISIT, PEMBIAYAAN NETTO, SILPA/SIKPA				
1	Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit	✓		
2	Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto	✓		
3	Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA	✓		
TRANSAKSI KHUSUS				
1	Transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah menurut kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi	✓		
2	Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/jasa dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan cara menaksir nilai barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi	✓		

< Nama Instansi >
< Aparat Pengawasan Intern >

KKR Nomor
Dibuat Oleh
Tanggal / Paraf
Direview Oleh
Tanggal / Paraf

KERTAS KERJA REVIU PROSEDUR ANALITIK

2. Pengklasifikasian

No	Uraian	S	TS	Penjelasan
PENDAPATAN				
1	Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu : Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	✓		
2	Pendapatan Asli Daerah diklasifikasikan dalam Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan retribusi Daerah, Pendapatan hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang sah	✓		
3	Pendapatan transfer diklasifikasikan dalam Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya, dan Transfer Pemerintah Provinsi	✓		
4	Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan diklasifikasikan dalam Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus	✓		
5	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya diklasifikasikan dalam Dana Otonomi Khusus, Dana penyesuaian	✓		
6	Transfer Pemerintah Provinsi diklasifikasikan dalam Pendapatan Bagi Hasil Pajak, Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	✓		
BELANJA				
1	Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (Jenis Belanja), Klasifikasi organisasi dan klasifikasi fungsi	✓		
2	Belanja yang diklasifikasi dalam jenis belanja yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak terduga	✓		
3	Belanja Operasi diklasifikasikan dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial	✓		
4	Belanja Modal diklasifikasikan dalam Belanja Tanah, Belanja Peralatan dan Mesin, Belanja Gedung dan Bangunan, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, Belanja Aset Tetap lainnya, serta Belanja Aset lainnya	✓		
PEMBIAYAAN				
1	Penerimaan Pembiayaan diklasifikasikan dalam penggunaan SILPA, Pencaliran Dana Cadangan, Pinjaman dalam negeri, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan kembali Pinjaman	✓		
2	Pengeluaran Pembiayaan diklasifikasikan dalam Pembentukan cadangan, Penyertaan Modal Pemda, Pembayaran pokok Pinjaman Dalam Negeri, Pemberian Pinjaman	✓		

2. Pengungkapan

No	Uraian	S	TS	Penjelasan
1	Yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti : kebijakan fiskal dan moneter, sebab sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya diungkap dalam catatan atas Laporan Keuangan	✓		
2	Daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka diungkap dalam catatan atas Laporan Keuangan	✓		
3	Informasi yang relevan dengan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang/jasa diungkap dalam catatan atas Laporan Keuangan	✓		

Keterangan: S = Sesuai
TS = Tidak sesuai

Lampiran II :

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2009 SEBELUM REVIU



OLEH

TIM REVIU INSPEKTORAT KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

Per 31 Desember 2009 dan 2008

Uraian	Ref	TAHUN 2009	TAHUN 2008	Uraian	Ref	TAHUN 2009	TAHUN 2008
ASET				KEWAJIBAN			
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas di Kas Daerah	1	12,078,212,565.66	33,590,477,256.56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	21	599,242,107.00	832,402,024.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2	4,105,528,652.00	8,826,965,445.00	Dana Titipan Pihak Ketiga	22	462,605,160.00	
Kas di Bendahara Penerima	3	790,080,841.00	24,363,259.00	Utang atas Putusan Pengadilan	23		9,614,985,769.89
Piutang Pajak	4	557,040,951.00	1,158,238,933.00	Utang Pihak Ketiga	24	-	139,600,000.00
Piutang Retribusi	5	10,593,890.00	22,418,000.00	Utang Jangka Pendek Lainnya	25	42,699,919.00	252,174,979.00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6	2,626,238,420.00	4,066,136,570.00	Jlh. Kewajiban Jk. Pendek		1,104,547,186.00	10,839,162,772.89
Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	7						
Piutang lainnya	8	76,500,000.00	76,500,000.00				
Persediaan	9	4,239,826,520.00	6,421,087,980.78				
				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			0.00
Jumlah Aktiva Lancar		24,484,021,839.66	54,186,187,444.34	Jlh. Kewajiban Jk. Panjang	26	0.00	0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG				Jumlah Kewajiban		1,104,547,186.00	10,839,162,772.89
Investasi Non Permanen							
Investasi Non Permanen Lainnya	10	737,375,000.00	737,375,000.00				
Jumlah Investasi Non Permanen		737,375,000.00	737,375,000.00				
Investasi Permanen				EKUITAS DANA			
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11	8,619,604,102.00	8,619,604,102.00	EKUITAS DANA LANCAR			
Jumlah Investasi Permanen		8,619,604,102.00	8,619,604,102.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	24	15,549,520,910.66	41,585,040,677.56
Jumlah Investasi Jk. Panjang		9,356,979,102.00	9,356,979,102.00	Pendapatan yg Ditungguhkan	25	362,453,881.00	24,363,259.00
ASET TETAP				Cadangan Piutang	26	3,270,373,261.00	5,323,293,503.00
Tanah	12	63,939,480,461.00	61,879,849,461.00	Cadangan Persediaan	27	4,239,826,520.00	6,421,087,980.78
Peralatan dan Mesin	13	115,914,264,393.50	100,657,395,513.50	Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk. Pendek	28	(42,699,919.00)	(10,006,760,748.89)
Gedung dan Bangunan	14	501,873,887,957.00	448,701,345,456.00	Jlh. Ekuitas Dana Lancar		23,379,474,653.66	43,347,024,671.45
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	435,446,469,909.00	409,896,971,509.00				
Aset Tetap Lainnya	16	17,993,830,213.00	16,970,331,213.00	EKUITAS DANA INVESTASI			
Konstruksi dalam Pengerjaan	17	23,367,052,238.00	4,389,571,100.00	Dilvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	29	9,356,979,102.00	9,356,979,102.00
Jumlah Aktiva Tetap		1,158,534,985,171.50	1,042,495,464,252.50	Dilvestasikan dalam Aset Tetap	30	1,158,534,985,171.50	1,042,495,464,252.50
DANA CADANGAN				Dilvestasikan dalam Aset Lainnya	31	19,229,971,539.79	19,229,971,539.79
Dana Cadangan		0.00	0.00	Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk. Panjang	32	0.00	0.00
Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00	Jlh. Ekuitas Dana Investasi		1,187,121,935,813.29	1,071,082,414,894.29
ASET LAINNYA				EKUITAS DANA CADANGAN			
Tagihan Penjualan Angsuran	18			Dilvestasikan dlm Dana Cadangan	33	0.00	0.00
Dana Sharing	19			Jlh. Ekuitas Dana Cadangan		0.00	0.00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20						
Aset lainnya		19,229,971,539.79	19,229,971,539.79	JUMLAH EKUITAS DANA		1,210,501,410,466.95	1,114,429,439,565.74
Jumlah Aset Lainnya		19,229,971,539.79	19,229,971,539.79	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA		1,211,605,957,652.95	1,125,268,602,338.63
TOTAL AKTIVA		1,211,605,957,652.95	1,125,268,602,338.63				



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

URAIAN	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pajak Daerah	1,720,458,350.00	3,656,764,352.12
Pendapatan Retribusi Daerah	3,419,077,636.00	4,385,465,888.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1,747,705,841.00
Lain-lain PAD yang Syah	1,783,654,247.00	
Bagi Hasil Pajak	4,274,231,711.10	10,948,999,041.40
Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	20,152,172,475.00	22,061,081,466.00
Dana Alokasi Umum	957,105,783.00	546,540,315.00
Dana Alokasi Khusus	391,553,317,000.00	385,019,188,000.00
Dana Otonomi Khusus	71,758,000,000.00	60,004,000,000.00
Bantuan Keuangan dari Provinsi	-	-
Dana Penyesuaian	-	-
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	11,940,225,000.00	3,413,856,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	16,089,069,840.00	13,691,876,710.46
Pendapatan Hibah	7,009,571,783.00	3,113,334,533.00
Pendapatan Dana Darurat	-	-
Pendapatan yang Ditangguhkan	-	1,500,000,000.00
Pendapatan Lainnya	-	24,363,259.00
Jumlah Arus Masuk Kas	530,656,883,825.10	510,113,175,405.98
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	331,768,229,557.00	310,979,690,403.00
Belanja Barang	65,611,136,493.00	72,501,602,818.00
Hibah	54,886,600,200.00	7,063,000,000.00
Bantuan Sosial	2,299,342,980.00	4,887,365,879.00
Belanja Bantuan Keuangan	-	-
Belanja Tak Terduga	5,262,255,000.00	2,527,302,120.00
Bagi Hasil Pajak	320,946,657.00	97,687,591.00
Bagi Hasil Retribusi	133,073,325.00	102,443,180.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	12,503,225,278.00	19,005,310,063.00
Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas	472,784,809,490.00	417,164,402,054.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	57,872,074,335.10	92,948,773,351.98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Aset Daerah	45,566,700.00	
Pendapatan Penjualan Kendaraan		
Jumlah Arus Masuk Kas	45,566,700.00	-
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	3,598,517,400.00	5,422,062,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	11,767,307,540.00	22,823,105,420.00
Belanja Gedung dan Bangunan	11,668,712,101.00	60,350,912,200.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46,165,265,508.00	87,543,032,469.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,126,959,500.00	991,462,100.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Jumlah Arus Keluar Kas	74,326,762,049.00	177,130,574,189.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(74,281,195,349.00)	(177,130,574,189.00)

URAIAN	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang	9,754,585,450.00	9,650,685,769.90
Jumlah Arus Keluar Kas	9,754,585,450.00	9,650,685,769.90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(9,754,585,450.00)	(9,650,685,769.90)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30,135,811,353.00	31,313,150,611.50
Contra Post Belanja TA 2009	128,186,697.00	
Penerimaan UP TA 2008	8,298,032,708.00	
Jumlah Arus Masuk Kas	38,562,030,758.00	31,313,150,611.50
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	30,391,546,339.00	30,480,748,587.50
Penyetoran UP TA 2009 yang masih berada Pada Bendahara Pengeluaran	3,519,042,646.00	
Jumlah Arus Keluar Kas	33,910,588,985.00	30,480,748,587.50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	4,651,441,773.00	832,402,024.00
Kenaikan/Penurunan Kas	(21,512,264,690.90)	(93,000,084,582.92)
Saldo Awal Kas di BUD	33,590,477,256.56	135,441,890,543.48
Saldo Akhir Kas di BUD	12,078,212,565.66	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	4,070,550,452.00	
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	1,533,426,312.00	
Saldo Akhir Kas	17,682,189,329.66	135,441,890,543.48





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

	URAIAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	%	REALISASI 2008
A	PENDAPATAN				
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pendapatan Pajak Daerah	3,171,517,500.00	1,720,458,350.00	54.25	3,656,764,352.12
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3,840,125,000.00	3,419,077,636.00	89.04	4,385,465,888.00
3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,741,028,173.00	1,783,654,247.00	102.45	
4	Lain-lain PAD yang Syah	11,249,874,327.00	4,319,798,411.10	38.40	1,747,705,841.00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah	20,002,545,000.00	11,242,988,644.10	56.21	10,948,999,041.40
					20,738,935,122.52
II	PENDAPATAN TRANSFER				
1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
	Bagi Hasil Pajak	20,980,350,918.00	20,152,172,475.00	96.05	22,061,081,466.00
	Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	927,247,190.00	957,105,783.00	103.22	546,540,315.00
	Dana Alokasi Umum	391,553,317,000.00	391,553,317,000.00	100.00	385,019,188,000.00
	Dana Alokasi Khusus	71,758,000,000.00	71,758,000,000.00	100.00	60,004,000,000.00
	Sub Jumlah	485,218,915,108.00	484,420,595,258.00	99.84	467,630,809,781.00
2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
	Dana Otonomi Khusus	-	-		0.00
	Dana Penyesuaian	3,413,856,000.00	11,940,225,000.00	349.76	3,413,856,000.00
	Sub Jumlah	3,413,856,000.00	11,940,225,000.00	349.76	3,413,856,000.00
	Transfer Pemerintah Provinsi				
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15,924,595,010.00	16,089,069,840.00	101.03	13,691,876,710.46
	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7,009,571,783.00	7,009,571,783.00	100.00	3,113,334,533.00
	Bantuan Keuangan Dari Propinsi				0.00
	Sub Jumlah	22,934,166,793.00	23,098,641,623.00	100.72	16,805,211,243.46
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER	511,566,937,901.00	519,459,461,881.00	101.54	487,849,877,024.46

III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH				
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya				1,500,000,000.00
	Sub Jumlah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	531,569,482,901.00	530,702,450,525.10	99.84	510,088,812,146.98
B	BELANJA				
I	BELANJA OPERASI				
1	Belanja Pegawai	351,260,549,910.00	331,679,993,496.00	94.43	310,979,690,403.00
2	Belanja Barang	73,969,773,395.00	65,571,185,857.00	88.65	72,501,602,818.00
3	Bunga	-	-	-	-
4	Subsidi	-	-	-	-
5	Hibah	55,547,400,000.00	54,886,600,200.00	98.81	7,063,000,000.00
6	Bantuan Sosial	2,300,000,000.00	2,299,342,980.00	99.97	4,887,365,879.00
	Jumlah Belanja Operasi	483,077,723,305.00	454,437,122,533.00	94.07	395,431,659,100.00
II	BELANJA MODAL				
1	Belanja Tanah	3,600,000,000.00	3,598,517,400.00	99.96	5,422,062,000.00
2	Belanja Peralatan dan Mesin	13,102,927,244.00	11,767,307,540.00	89.81	22,823,105,420.00
3	Belanja Gedung dan Bangunan	15,801,061,063.00	11,668,712,101.00	73.85	60,350,912,200.00
4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,736,720,955.00	46,165,265,508.00	92.82	87,543,032,469.00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	1,473,822,000.00	1,126,959,500.00	76.47	991,462,100.00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan				
	Jumlah Belanja Modal	83,714,531,262.00	74,326,762,049.00	88.79	177,130,574,189.00
III	Belanja Tak Terduga	5,563,250,274.00	5,262,255,000.00	94.59	2,527,302,120.00
	JUMLAH BELANJA	572,355,504,841.00	534,026,139,582.00	93.30	575,089,535,409.00
IV	TRANSFER				
	TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA				
1	Bagi Hasil Pajak	350,000,000.00	320,946,657.00	91.70	97,687,591.00
2	Bagi Hasil Retribusi	400,000,000.00	133,073,325.00	33.27	102,443,180.00
3	Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	13,202,800,000.00	12,503,225,278.00	94.70	19,005,310,063.00
4	Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa				-
	Jumlah	13,952,800,000.00	12,957,245,260.00	92.86	19,205,440,834.00

	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	586,398,304,841.00	546,983,384,842.00	93.28	594,294,976,243.00
C	SURPLUS/ (DEFISIT)	(54,828,821,940.00)	(16,280,934,316.90)	29.69	(84,206,164,096.02)
V	PEMBIAYAAN				
A	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
	Penggunaan SILPA	41,585,040,678.00	41,585,040,677.56	100.00	135,441,890,543.48
	Penerimaan Piutang Daerah	5,323,293,503.00	-		0
	Jumlah Penerimaan	46,908,334,181.00	41,585,040,677.56	88.65	135,441,890,543.48
B	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
	Pembayaran Pokok Utang	9,754,585,490.00	9,754,585,450.00	100.00	9,650,685,769.90
	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				-
	Jumlah Pengeluaran	9,754,585,490.00	9,754,585,450.00	100.00	9,650,685,769.90
	PEMBIAYAAN NETTO	37,153,748,691.00	31,830,455,227.56	85.67	125,791,204,773.58
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	(17,675,073,249.00)	15,549,520,910.66	(87.97)	41,585,040,677.56
	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA)				

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ALIS MARAJO



Lampiran III :

LAPORAN KEUANGAN PEMDA KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2009 SETELAH DI AUDIT



OLEH
TIM BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NERACA

Per 31 Desember 2009 dan 2008

Uraian	Ref	TAHUN 2009	TAHUN 2008	Uraian	Ref	TAHUN 2009	TAHUN 2008
A S E T				KEWAJIBAN			
ASET LANCAR				KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Kas di Kas Daerah	1	12,078,212,565.66	33,590,477,256.56	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	21	599,242,107.00	832,402,024.00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2	4,070,550,452.00	8,826,965,445.00	Dana Titipan Pihak Ketiga	22	657,324,070.00	0.00
Kas di Bendahara Penerimaan	3	1,533,426,312.00	24,363,259.00	Utang atas Putusan Pengadilan	23	0.00	9,614,985,769.89
Piutang Pajak	4	3,038,590,335.00	1,158,238,933.00	Bagian Lancar Utang DN-Pemerintah Pusat	24	0.00	
Piutang Retribusi	5	10,593,890.00	22,418,000.00	Utang Pihak Ketiga	25	0.00	139,600,000.00
Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pajak	6	2,581,126,030.00	4,066,136,570.00	Utang Jangka Pendek Lainnya	26	3,012,633,381.40	252,174,979.00
Piutang lainnya	8	117,955,977.38	76,500,000.00	Jlh. Kewajiban Jk. Pendek		4,269,199,558.40	10,839,162,772.89
Persediaan	9	5,078,234,520.00	6,421,087,980.78				
				KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0.00	0.00
Jumlah Aktiva Lancar		28,508,690,082.04	54,186,187,444.34	Jlh. Kewajiban Jk. Panjang	27	0.00	0.00
INVESTASI JANGKA PANJANG				Jumlah Kewajiban		4,269,199,558.40	10,839,162,772.89
Investasi Non Permanen							
Investasi Non Permanen Lainnya	10	737,375,000.00	737,375,000.00				
Jumlah Investasi Non Permanen		737,375,000.00	737,375,000.00				
Investasi Permanen							
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11	8,619,604,102.00	8,619,604,102.00	EKUITAS DANA			
Jumlah Investasi Permanen		8,619,604,102.00	8,619,604,102.00	EKUITAS DANA LANCAR			
Jumlah Investasi Jk. Panjang		9,356,979,102.00	9,356,979,102.00	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	24	15,549,520,910.66	41,585,040,677.56
ASET TETAP				Pendapatan yg Ditangguhkan	25	876,102,242.00	24,363,259.00
Tanah	12	63,819,269,461.00	61,879,849,461.00	Cadangan Piutang	26	5,748,266,232.38	5,323,293,503.00
Peralatan dan Mesin	13	115,362,443,193.50	100,657,395,513.50	Cadangan Persediaan	27	5,078,234,520.00	6,421,087,980.78
Gedung dan Bangunan	14	501,873,887,957.00	448,701,345,456.00	Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Pendek	28	(3,012,633,381.40)	(10,006,760,748.89)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	15	435,446,469,909.00	409,896,971,509.00				
Aset Tetap Lainnya	16	17,040,943,333.00	16,970,331,213.00	Jlh. Ekuitas Dana Lancar		24,239,490,523.64	43,347,024,671.45
Konstruksi dalam Pengerjaan	17	23,367,052,238.00	4,389,571,100.00				
Jumlah Aktiva Tetap		1,156,910,066,091.50	1,042,495,464,252.50	EKUITAS DANA INVESTASI			
DANA CADANGAN				Dilinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	29	9,356,979,102.00	9,356,979,102.00
Dana Cadangan		0.00	0.00	Dilinvestasikan dalam Aset Tetap	30	1,156,910,066,091.50	1,042,495,464,252.50
Jumlah Dana Cadangan		0.00	0.00	Dilinvestasikan dalam Aset Lainnya	31	19,941,271,619.79	19,229,971,539.79
ASET LAINNYA				Dana yg hrs disediakan utk Pembayaran Utang Jk.Panjang	32	0.00	0.00
Tagihan Penjualan Angsuran	18			Jlh. Ekuitas Dana Investasi		1,186,208,316,813.29	1,071,082,414,894.29
Dana Sharing	19			EKUITAS DANA CADANGAN			
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	20			Dilinvestasikan dlm Dana Cadangan	33	0.00	0.00
Aset Lainnya		19,941,271,619.79	19,229,971,539.79	Jlh. Ekuitas Dana Cadangan		0.00	0.00
Jumlah Aset Lainnya		19,941,271,619.79	19,229,971,539.79	JUMLAH EKUITAS DANA		1,210,447,807,336.93	1,114,429,439,565.74
TOTAL AKTIVA		1,214,717,006,895.33	1,125,268,602,338.63	TOTAL KEWAJIBAN & EKUITAS DANA		1,214,717,006,895.33	1,125,268,602,338.63



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009

URAIAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	%	REALISASI 2008
PENDAPATAN				
PENDAPATAN ASLI DAERAH				
Pendapatan Pajak Daerah	3,171,517,500.00	1,720,458,350.00	54.25	1,832,501,258.00
Pendapatan Retribusi Daerah	3,840,125,000.00	3,419,077,636.00	89.04	3,262,711,589.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,741,028,173.00	1,783,654,247.00	102.45	1,333,779,364.00
Lain-lain PAD yang Syah	11,199,874,327.00	4,319,798,411.10	38.57	11,252,912,569.31
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	19,952,545,000.00	11,242,988,644.10	56.35	17,681,904,780.31
PENDAPATAN TRANSFER				
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT DANA PERIMBANGAN				
Bagi Hasil Pajak	20,980,352,804.00	20,152,172,475.00	96.05	21,609,240,376.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	927,247,190.00	957,105,783.00	103.22	996,803,217.00
Dana Alokasi Umum	391,553,317,000.00	391,553,317,000.00	100.00	344,547,000,000.00
Dana Alokasi Khusus	71,758,000,000.00	71,758,000,000.00	100.00	49,165,000,000.00
Sub Jumlah	485,218,916,994.00	484,420,595,258.00	99.84	416,318,043,593.00
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA				
Dana Otonomi Khusus				
Dana Penyesuaian	3,413,856,000.00	11,940,225,000.00	349.76	-
Sub Jumlah	3,413,856,000.00	11,940,225,000.00	349.76	-
Transfer Pemerintah Provinsi				
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	15,924,595,010.00	16,089,069,840.00	101.03	10,935,594,281.00
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7,009,571,783.00	7,009,571,783.00	100.00	
Bantuan Keuangan Dari Propinsi				12,842,022,675.00
Sub Jumlah	22,934,166,793.00	23,098,641,623.00	100.72	23,777,616,956.00
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SYAH				
Pendapatan Hibah				
Pendapatan Dana Darurat				
Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
Sub Jumlah	-	-	-	-
JUMLAH PENDAPATAN	531,519,484,787.00	530,702,450,525.10	99.85	457,777,565,329.31
BELANJA				
BELANJA OPERASI				
Belanja Pegawai	346,635,749,030.00	331,679,993,496.00	95.69	234,456,342,388.00
Belanja Barang	73,969,773,395.00	65,571,185,857.00	88.65	48,280,790,050.00
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah	7,097,560,000.00	54,886,600,200.00	773.32	1,300,000,000.00
Bantuan Sosial	5,200,000,000.00	2,328,111,096.00	44.77	8,269,389,350.00
Jumlah Belanja Operasi	432,903,082,425.00	454,465,890,649.00	104.98	292,306,521,788.00
BELANJA MODAL				
Belanja Tanah	3,600,000,000.00	3,598,517,400.00	99.96	199,980,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	13,102,927,244.00	11,767,307,540.00	89.81	16,631,273,203.58
Belanja Gedung dan Bangunan	15,801,061,063.00	11,668,712,101.00	73.85	44,704,614,593.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	49,740,920,955.00	46,165,265,508.00	92.81	66,556,508,553.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,473,822,000.00	1,126,959,500.00	76.47	1,573,722,400.00
Belanja Instruksi Dalam Pengerjaan				
Jumlah Belanja Modal	83,718,731,262.00	74,326,762,049.00	88.78	129,666,098,749.58
Belanja Tak Terduga	5,935,780,393.00	5,262,255,000.00	88.65	794,515,000.00
JUMLAH BELANJA	522,557,594,080.00	534,054,907,698.00	102.20	422,767,135,537.58
TRANSFER				
TRANSFER BAGI HASIL KE KAB/KOTA				
Bagi Hasil Pajak	402,858,426.00	292,178,912.00	72.53	286,929,415.00
Bagi Hasil Retribusi	162,460,200.00	133,073,116.00	81.91	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	19,445,200,000.00	12,503,225,116.00	64.30	
Bantuan Keuangan pada Pemerintahan Desa				12,553,595,690.00
Jumlah	20,010,518,626.00	12,928,477,144.00	64.61	12,840,525,105.00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	542,568,112,706.00	546,983,384,842.00	100.81	435,607,660,642.58
PLUS/ (DEFISIT)	(522,615,567,708.00)	(16,280,934,316.90)	3.12	22,169,904,686.73
PEMBIAYAAN				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
Penerimaan SIPPA	135,441,890,543.00	41,585,040,677.56	30.70	114,271,985,857.17
Penerimaan Piutang Daerah	3,463,677,978.00			
Jumlah Penerimaan	138,905,568,521.00	41,585,040,677.56	29.94	114,271,985,857.17

URATAN	ANGGARAN 2009	REALISASI 2009	%	REALISASI 2008
PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
Pembayaran Pokok Utang	9,650,985,490.00	9,754,585,450.00		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah				1,000,000,000.00
Jumlah Pengeluaran	9,650,985,490.00	9,754,585,450.00	101.07	1,000,000,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	129,254,583,031.00	31,830,455,227.56	24.63	113,271,985,857.17
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(393,360,984,675.00)	15,549,520,910.66	(3.95)	135,441,890,543.90
Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA)				





PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2009 DAN 2008

URAIAN	2009	2008
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Pajak Daerah	1,720,458,350.00	3,656,764,352.12
Pendapatan Retribusi Daerah	3,419,077,636.00	4,385,465,888.00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1,783,654,247.00	1,747,705,841.00
Lain-lain PAD yang Syah	4,274,231,711.10	10,948,999,041.40
Bagi Hasil Pajak	20,152,172,475.00	22,061,081,466.00
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	957,105,783.00	546,540,315.00
Dana Alokasi Umum	391,553,317,000.00	385,019,188,000.00
Dana Alokasi Khusus	71,758,000,000.00	60,004,000,000.00
Dana Otonomi Khusus		
Bantuan Keuangan dari Provinsi		
Dana Penyesuaian	11,940,225,000.00	3,413,856,000.00
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	16,089,069,840.00	13,691,876,710.46
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	7,009,571,783.00	3,113,334,533.00
Pendapatan Hibah		
Pendapatan Dana Darurat	-	1,500,000,000.00
Pendapatan yang Ditangguhkan	362,453,881.00	24,363,259.00
Pendapatan Lainnya	-	
Jumlah Arus Masuk Kas	531,019,337,706.10	510,113,175,405.98
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Pegawai	331,679,993,496.00	310,979,690,403.00
Belanja Barang	65,571,185,857.00	72,501,602,818.00
Hibah	54,886,600,200.00	7,063,000,000.00
Bantuan Sosial	2,328,111,096.00	4,887,365,879.00
Belanja Bantuan Keuangan		
Belanja Tak Terduga	5,262,255,000.00	2,527,302,120.00
Bagi Hasil Pajak	292,178,912.00	97,687,591.00
Bagi Hasil Retribusi	133,073,116.00	102,443,180.00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	12,503,225,116.00	19,005,310,063.00
Belanja Bantuan Keuangan pada Pemerintah Desa		
Jumlah Arus Keluar Kas	472,656,622,793.00	417,164,402,054.00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	58,362,714,913.10	92,948,773,351.98
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN		
ARUS MASUK KAS		
Pendapatan Aset Daerah	45,566,700.00	
Pendapatan Penjualan Kendaraan		
Jumlah Arus Masuk Kas	45,566,700.00	-
ARUS KELUAR KAS		
Belanja Tanah	3,598,517,400.00	5,422,062,000.00
Belanja Peralatan dan Mesin	11,767,307,540.00	22,823,105,420.00
Belanja Gedung dan Bangunan	11,668,712,101.00	60,350,912,200.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	46,165,265,508.00	87,543,032,469.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,126,959,500.00	991,462,100.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan		
Jumlah Arus Keluar Kas	74,326,762,049.00	177,130,574,189.00

URAIAN	2009	2008
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(74,281,195,349.00)	(177,130,574,189.00)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN		
ARUS MASUK KAS		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Jumlah Arus Masuk Kas	-	-
ARUS KELUAR KAS		
Pembentukan Dana Cadangan		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
Pembayaran Pokok Utang	9,754,585,450.00	9,650,685,769.90
Jumlah Arus Keluar Kas	9,754,585,450.00	9,650,685,769.90
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(9,754,585,450.00)	(9,650,685,769.90)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN		
ARUS MASUK KAS		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35,475,009,268.00	31,313,150,611.50
Jumlah Arus Masuk Kas	35,475,009,268.00	31,313,150,611.50
ARUS KELUAR KAS		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	35,356,834,621.00	30,480,748,587.50
Jumlah Arus Keluar Kas	35,356,834,621.00	30,480,748,587.50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	118,174,647.00	832,402,024.00
kenaikan/Penurunan Kas	(25,554,891,238.90)	(93,000,084,582.92)
Saldo Awal Kas	42,417,442,701.56	135,441,890,543.48
Kas di Kas Daerah	33,590,477,256.56	
Kas di Bendahara Pengeluaran	8,826,965,445.00	
Jumlah Saldo Awal	42,417,442,701.56	135,441,890,543.48
Kas Per 31 Desember 2009/2008	16,973,822,058.66	42,441,805,960.56
Kas di Kas Daerah	12,078,212,565.66	33,590,477,256.56
Kas di Bendahara Pengeluaran	4,105,528,652.00	8,826,965,445.00
Kas di Bendahara Penerima	790,080,841.00	24,363,259.00



Lampiran IV :

LAPORAN PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH PEMDA KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2009 TANGGAL 11 OKTOBER 2010



OLEH

BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT



**SAMBUTAN KEPALA PERWAKILAN
BPK RI PROVINSI SUMATERA BARAT
PADA
PENYERAHAN HASIL PEMERIKSAAN
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN ANGGARAN 2009
TANGGAL 11 OKTOBER 2010**

Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota

Yth. Pj. Bupati Lima Puluh Kota

Yth. Para Pejabat Kabupaten Lima Puluh Kota

Yth. Para Pejabat BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Serta Hadirin yang saya muliakan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat Siang, dan Salam Sejahtera untuk kita semua

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT dengan mengucapkan Alhamdulillah atas limpahan rahmat, dan ridho-Nya kita dapat berkumpul dan bertemu di ruang rapat ini. Sebagaimana yang kami sampaikan kepada Saudara-Saudara melalui undangan, pada hari ini, Senin tanggal 11 Oktober 2010 kami bermaksud untuk menyerahkan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota 2009 kepada Saudara-Saudara sekalian sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena itu, atas nama Badan Pemeriksa Keuangan RI, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Saudara-Saudara untuk hadir pada acara penyerahan Hasil Pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009 ini.

Ketua DPRD dan Pjs. Bupati Lima Puluh Kota yang saya hormati,

Serta para Hadirin yang saya muliakan,

Pada saat ini, seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Barat telah menyerahkan LKPD TA 2009 kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat. Dari 20 LKPD yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat, 19 LKPD telah selesai kami periksa dan masih terdapat satu LKPD yang belum dilakukan pemeriksaan. LHP atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009 ini merupakan LHP yang ke 17 di Provinsi Sumatera Barat yang kami serahkan kepada Kepala Daerah dan Ketua DPRD dalam forum pertemuan di Kantor BPK RI Perwakilan Sumbar di Padang ini.

Ketua DPRD, Bupati dan para Pejabat lainnya yang saya hormati,

Serta para Hadirin yang saya muliakan,

Hasil Pemeriksaan atas LKPD TA 2009 ini terdiri dari tiga buku. Buku I merupakan Hasil Pemeriksaan yang memuat opini, Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan arus Kas, serta Catatan atas Laporan Keuangan. Buku II memuat temuan pemeriksaan tentang efektifitas sistem pengendalian intern, dan Buku III memuat temuan pemeriksaan atas kepatuhan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah.

1. Pemeriksaan LKPD ditujukan untuk memberikan opini atas tingkat kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:

1. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
2. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan;
4. Efektivitas sistem pengendalian intern.

2. Pemeriksaan LKPD tersebut dilakukan dengan melakukan pengujian atas asersi (pernyataan) manajemen atas akun-akun yang terdapat dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang terdiri dari:

1. Keberadaan dan keterjadian;
2. Kelengkapan;
3. Penilaian dan alokasi;
4. Hak dan kewajiban dan;
5. Penyajian dan pengungkapan.

3. Opini atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009 yang akan kami serahkan pada hari ini adalah **Wajar Dengan Pengecualian**. Pemberian Opini Wajar Dengan Pengecualian pada Laporan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

1. Terdapat Penerimaan Dana Kapitasi Askes dan Jamkesmas yang tidak dicatat sebagai pendapatan daerah dan dikelola secara langsung oleh RSUD Suliki dan 20 puskesmas sebesar Rp2.425.698.586,00 (Rp1.701.194.124,00 + Rp724.504.462,00). Penerimaan tersebut digunakan secara langsung untuk belanja operasional RSUD dan 20 Puskesmas sebesar Rp2.425.698.586,00. Hal tersebut mengakibatkan kurang saji (*understated*) atas realisasi Pendapatan Retribusi Daerah dan realisasi Belanja Barang dan Jasa pada LRA.

2. Terdapat Belanja Pegawai pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp181.000.000,00 yang seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Bantuan Sosial karena merupakan bantuan untuk anak yatim dan keluarga miskin yang diberikan secara tunai. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Pegawai sebesar tersebut di atas.

3. Terdapat Belanja Barang dan Jasa pada Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebesar Rp120.000.000,00 yang seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Bantuan Sosial karena merupakan bantuan masjid-mesjid yang diberikan secara tunai. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Barang dan Jasa sebesar tersebut di atas.

4. Terdapat Belanja Modal Tanah pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan serta Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura sebesar Rp1.599.097.400,00 yang seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Barang dan Jasa karena tidak menambah Aset Tanah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Modal Tanah sebesar tersebut di atas.

5. Terdapat Belanja Gedung dan Bangunan pada Dinas Perikanan sebesar Rp312.636.000,00 yang direalisasikan untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Hibah karena tidak menambah Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar tersebut di atas.

6. Terdapat Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Dinas Perikanan sebesar Rp1.029.717.400,00 yang direalisasikan untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Hibah karena tidak menambah Aset Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut

mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar tersebut di atas.

7. Terdapat Belanja Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan bibit dan tanaman pada Dinas Kehutanan sebesar Rp838.408.000,00 yang direalisasikan untuk diserahkan kepada masyarakat. Realisasi belanja tersebut seharusnya dibebankan ke dalam Belanja Barang dan Jasa karena tidak menambah Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota TA 2009. Hal tersebut mengakibatkan lebih saji (*overstated*) pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar tersebut di atas.

Kami mengharapkan akun yang dikecualikan ini supaya dibenahi, karena tanpa ada perbaikan terhadap permasalahan tersebut, opini LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota sulit untuk meningkat. Kami berharap LHP LKPD TA 2009 dapat dipaparkan oleh Sekretaris Daerah, Kepala DPKD dan Inspektorat di depan seluruh Kepala SKPD, sehingga para Kepala SKPD ke depan dapat menyikapinya agar opini LKPD bisa lebih baik.

Sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara Pasal 20, kami harapkan para pejabat menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan ini dan menyampaikan jawaban atau penjelasan secara tertulis kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima, serta DPRD selaku lembaga perwakilan supaya menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Khusus mengenai tindaklanjut oleh DPRD, apabila terdapat kekurangan atau isi atau materi Hasil Pemeriksaan BPK RI, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK RI Perwakilan dalam rangka menjelaskan materi hasil pemeriksaan.

*Bupati, Ketua DPRD, dan para Pejabat lainnya yang saya hormati,
Serta para Hadirin yang saya muliakan,*

Terlepas dari hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Lima Puluh Kota yang memuat opini belum sesuai dengan yang diharapkan, BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat sebenarnya mempunyai keinginan yang sangat besar agar Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, dan transparan. Hal ini sudah merupakan salah satu tujuan strategis BPK RI yang dimuat dalam dokumen Rencana Strategis BPK RI periode 2006-2010, yaitu "Mendorong terwujudnya tata kelola yang baik atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara".

Dalam implementasinya, Rencana Strategis BPK RI tersebut juga mencakup mendorong Pemerintah Daerah untuk dapat menyusun LKPD dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

*Ketua DPRD, Pjs. Bupati, dan para Pejabat lainnya yang saya hormati,
Serta para Hadirin yang saya muliakan,*

Perlu dipahami bahwa LKPD dengan predikat WTP bukanlah segalanya. Karena pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ideal adalah pengelolaan dan tanggung jawab yang dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan bebas KKN. Sedangkan LKPD dengan predikat WTP hanya menunjukkan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan secara transparan.

Oleh karena itu kita semua yaitu Pemerintah Daerah selaku pihak eksekutif dan DPRD selaku pihak legislatif bersama-sama dengan BPK RI selaku pihak inspektif masih harus bekerja keras guna mewujudkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang ideal tersebut

3

Lampiran V :

SURAT SETORAN PAJAK (SSP) KANTOR SATPOL-PP
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BULAN MEI TAHUN 2009



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Surat Setoran Pajak

as Penyeter :

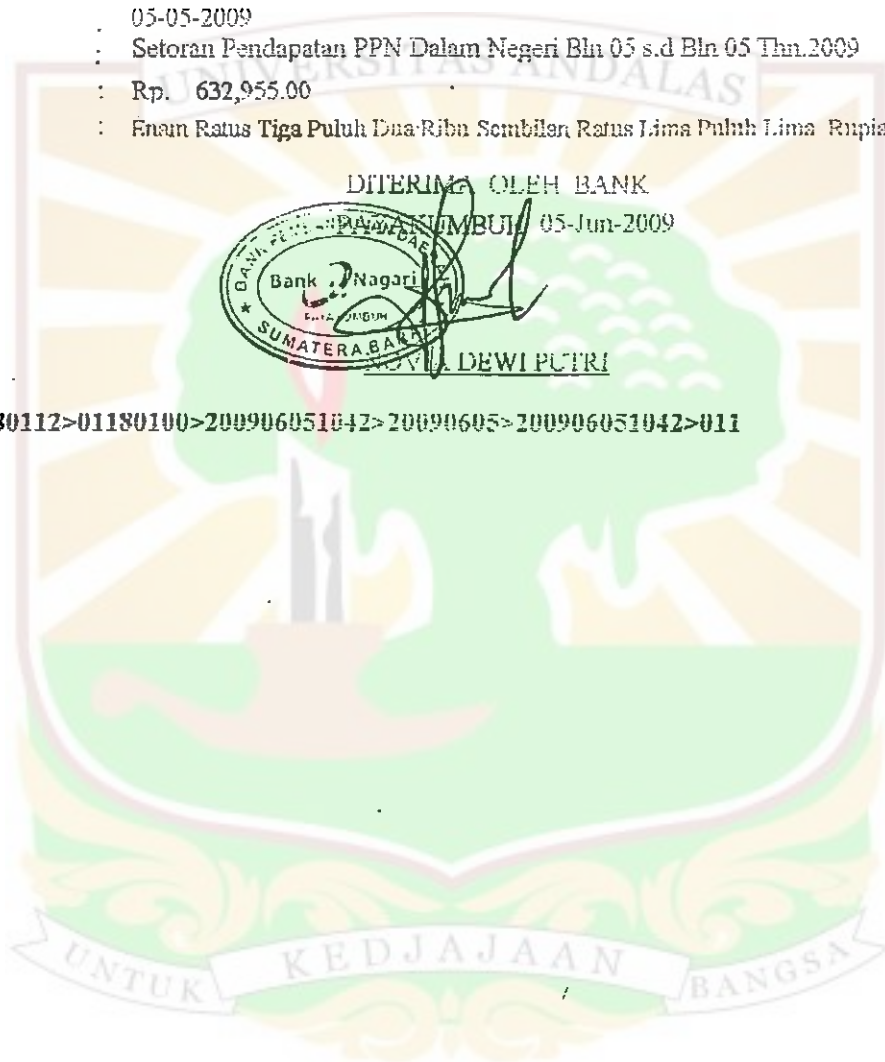
NPWP : 00.362.031.7-204-000
Nama WP : PEMEGANG KAS KTR SATUAN POLISI
No. Setoran : SUDIRMAN NO 1
Kode Setoran : 000000000000000

a Pembayaran

Anggaran : 41121.- Pendapatan PPN Dalam Negeri
Setoran : 100
Tanggal Pajak : 05-05-2009
Jumlah pembayaran : Setoran Pendapatan PPN Dalam Negeri Bln 05 s.d Bln 05 Thn.2009
Nilai Setoran : Rp. 632,955.00
Uraian : Enam Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Rupiah

idasi

09101406>010016380112>01180100>200906051042>20090605>200906051042>011



$$: \begin{array}{|c|c|} \hline 0 & 0 \\ \hline \end{array} . \begin{array}{|c|c|c|} \hline 3 & 6 & 2 \\ \hline \end{array} . \begin{array}{|c|c|c|} \hline 6 & 3 & 1 \\ \hline \end{array} . \begin{array}{|c|} \hline 7 \\ \hline \end{array} - \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 2 \\ \hline \end{array} . \begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 0 & 2 \\ \hline \end{array}$$

Angka Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

WP . Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

T . Jl.Jend, Soedirman No.1 Payakumbuh

Kode Jenis Pajak	Kode Jenis Setoran
------------------	--------------------

$$\begin{array}{|c|c|c|} \hline 2 & 1 & 1 \\ \hline \end{array} \quad \begin{array}{|c|c|c|} \hline 1 & 0 & 0 \\ \hline \end{array}$$

Uraian Pembayaran
Pendapatan PPN Dalam Negeri

Masa Pajak

Tahun

0	Mar	Apr	Week	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
---	-----	-----	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

$$\begin{array}{|c|} \hline 2 \\ \hline \end{array} \cdot \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 0 \\ \hline \end{array} \begin{array}{|c|} \hline 9 \\ \hline \end{array}$$

ng pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

tetapan : $\left[\begin{array}{|c|c|c|c|} \hline - & - & - & - \\ \hline \end{array} \right] / \left[\begin{array}{|c|c|c|} \hline - & - & - \\ \hline \end{array} \right] / \left[\begin{array}{|c|c|} \hline - & - \\ \hline \end{array} \right] / \left[\begin{array}{|c|c|c|} \hline - & - & - \\ \hline \end{array} \right] / \left[\begin{array}{|c|c|} \hline - & - \\ \hline \end{array} \right]$

Norma Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

mbayaran
piah penuh

Terbilang : Enam ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah.

955.-

ima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal

Cap dan tanda tangan

JUN 5 2009

as :

Idasi Kantor Penerima Pembayaran

PEMERINTAH
Kabupaten
Payakumbuh
Kantor Satuan
Pamong Praja

Wakil/Pajak/Penyeter
Payakumbuh..... tgl

Payakumbuh..... tgl Mei. 2009

Cap: _____ tanda tangan

Nama Jelas: Wahya Marnora Samry, SH

petunjuk pengisian

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Surat Setoran Pajak

00 362 031.7-20 1-000
PEMBAYARAN KAS NITAS NITL SVL AN POLISI
SUDIRMAN NO 1
000000000000000000

41117 - Pendapatan PPh Pasal 21

100

05-05-2009

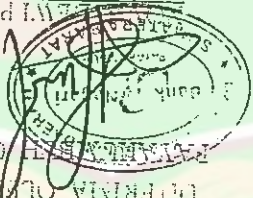
Setoran Pendapatan PPh Pasal 21 Bln 05 s.d Bln 05 Thn.2009

Rp 1.795.000,00

Satu Juta Tujuh Ratus Sembilan Ratus Lima Ribu Rupiah

PT PRIMA OLIN BANK

REKORSA BUKTI 03-Jun-2009



PT PRIMA OLIN BANK

401030509>010016380113>01180100>200906051043>20090605>200906051043>911



SURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

LEMBAR 1
Untuk Arsip WP

P : 0 0 . 3 6 2 . 0 3 1 . 7 - 2 0 2 . 2 0 2

dengan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

A WP : Bendahara Pengeluaran Kantor Satpolisi Pamong Praja

AT : Jl. Jend. Soedirman No. 1 Payakumbuh

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1 2 1 1

1 0 0

Uraian Pembayaran

Pendapatan PPh Pasal 21

Masa Pajak

Tahun

Feb Mar Apr ~~Mei~~ Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 9

bilang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan

Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - -

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran
rupiah penuh

795.000,-

Terbilang : Satu juta tujuh ratus lima ribu sembilan puluh lima ribu rupiah.

Prima oleh Kantor Penerima Pembayaran
Tanggal 05 JUN 2009

Cap dan tanda tangan



Kabupaten Payakumbuh, tgl 05 Mei 2009
Cap dan tanda tangan

elast :

Nama Jelas : Mulya Martora Samry, SH

validasi Kantor Penerima Pembayaran

ku petunjuk pengisian

BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Surat Setoran Pajak

atas Penyetor :

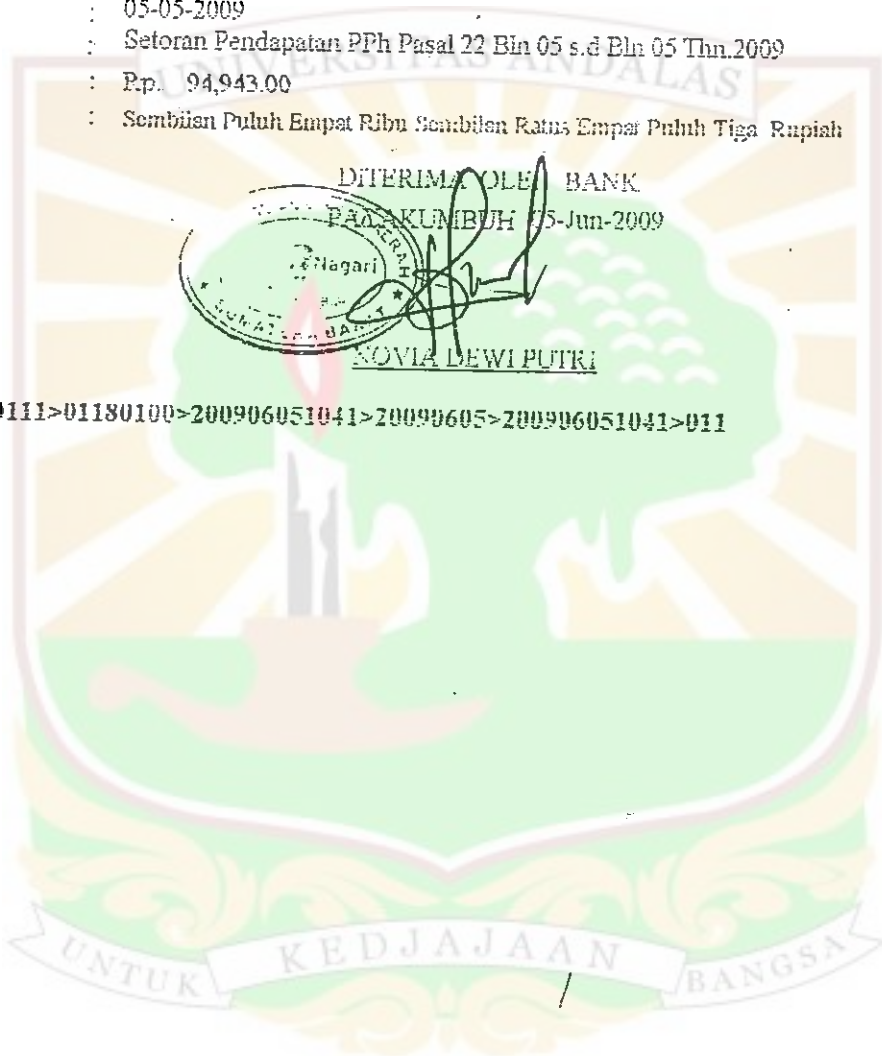
W.P : 00.362.031 7-2014-000
No WP : PEMILIK KAS KIR SATUAN POLISI
No WP : SUDIRMAN NO 1
Ketetapan : 0000000000000000

no Pembayaran

Anggaran : 411121- Pendapatan PPh Pasal 22
Setoran : 900
Pajak : 05-05-2009
no pembayaran : Setoran Pendapatan PPh Pasal 22 Bln 05 s.d Bln 05 Thn.2009
Jumlah Setoran : Rp. 94,943.00
bilang : Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Idasi

04121107>010016380111>01180100>200906051041>20090605>200906051041>011



LEMBAR

1

Untuk Arsip WP

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I
DIREKTORAT JENDERAL PAJAKSURAT SETORAN PAJAK
(SSP)

: 0 0 . 3 6 2 . 0 3 1 . 7 - 2 0 2 . 2 0 2

Kode dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang dimiliki

WP : Bendahara Pengeluaran Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

AT : Jl. Jend. Soedirman No.1 Payakumbuh.

Kode Jenis Pajak Kode Jenis Setoran

1 2 2

9 0 0

Uraian Pembayaran

Pendapatan PPh Pasal 22

Masa Pajak

Tahun

b Mar Apr ~~MAY~~ Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des

2 0 0 9

Beri tanda centang pada salah satu kolom bulan untuk masa yang berkenaan:

Diisi tahun terutangnya pajak

Ketetapan : - - - - - / - - - - - / - - - - - / - - - - -

Nomor Ketetapan : STP, SKPKB, SKPKBT

Pembayaran

Rupiah penuh

943,-

Terbilang : Sembilan puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah.

Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran

Tanggal 05 JUN 2009

Cap dan tanda tangan

Nama Jelas :

Nama Jelas : Wakti Waktora Samry, SH

Validasi Kantor Penerima Pembayaran

Untuk petunjuk pengisian

Lampiran VI :

BUKU KAS UMUM (BKU) KANTOR SATPOL-PP KABUPATEN
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2009



KABUPATEN LIMA PULUH KOTA BUKU KAS UMUM

D

guna Anggaran:
ahara Pengeluaran
n Anggaran

: KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
: Nasriyanto,ST
: Wahyu Marmora Samry, SH
: Mei 2009

Halaman : 15

Tanggal	Kode Rekening										Uraian	Penerimaan Rp.	Pengeluaran Rp.	
2	3										4	5	6	
01-Mei-09											Diterima / Dibayarkan SP2D Gaji No. 271A/SG/2009 tanggal 01Mal 2009 untuk Pembayaran Gaji PNS Kantor Satpol-PP bulan Mal 2009 a/n Fitra Yosi			
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01	Gaji dan Tunjangan		
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 01	Gaji Pokok PNS	Rp 80.691.160	Rp 80.691.160
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 02	Tunjangan Keluarga	Rp 6.449.598	Rp 6.449.598
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 03	Tunjangan Jabatan	Rp 5.120.000	Rp 5.120.000
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 05	Tunjangan Umum	Rp 8.755.000	Rp 8.755.000
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 06	Tunjangan Beras	Rp 5.613.300	Rp 5.613.300
	1	19	1	19	02	00	00	5	1	1	01 07	Tunjangan PPh / Khusus	Rp 706.334	Rp 706.334
07-Mei-09											Diterima/Dibayarkan SP2D GU no 221/GU/2009 tanggal 7 Mei 2009 Untuk Pembayaran Ganti Uang Bulan Maret 2009	Rp 133.927.955		
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	02	5	2	2	03 01	Dibayarkan biaya tagihan telpon Kantor Satpol-PP bulan Mei 2009.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.		Rp 122.353
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	02	5	2	2	03 03	Dibayarkan biaya tagihan listrik Kantor Satpol-PP bulan Mei 2009.Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik.		Rp 127.980
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	07	5	2	1	01 04	Dibayarkan Honorarium Pegawai Penyedia Jasa Administrasi bulan Mei 2009 pada Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.		Rp 4.150.000
31-Mei-09											Dipungut/Dipotong -PPh Pasal 21	Rp 480.000	Rp 480.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	07	5	2	1	02 02	Dibayarkan Honorarium Pegawai Honorir Bulan Mei 2009.Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan.		Rp 13.900.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	10	5	2	2	01 01	Pembayaran alat tulis untuk bulan Mei 2009.Kegiatan penyodia alat tulis kantor.		Rp 1.058.000
											Dipungut/Dipotong - PPN	Rp 96.182	Rp 96.182	
											- PPh Pasal 22	Rp 14.427	Rp 14.427	
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	10	5	2	2	01 01	Pembayaran alat tulis untuk bulan April 2009.Kegiatan penyedia alat tulis kantor.		Rp 942.500
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	10	5	2	2	01 01	Pembayaran alat tulis untuk bulan Mei 2009.Kegiatan penyedia alat tulis kantor.		Rp 999.500
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	11	5	2	2	06 01	Pembayaran biaya cetak blanko untuk bulan April 2009. Kegiatan penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan.		Rp 630.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	11	5	2	2	06 01	Pembayaran biaya cetak blanko untuk bulan Mei 2009. Kegiatan penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan.		Rp 720.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	11	5	2	2	06 02	Pembayaran biaya fotocopy surat surat dan dokumen untuk bulan Maret dan April 2009. Kegiatan Penyedia Barang Cetakan dan Penggandaan.		Rp 450.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	17	5	2	2	11 02	Dibayarkan makan dan minum rapat Kantor Satpol-PP untuk Bulan Mei 2009 Dibebankan pada Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		Rp 437.500
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	17	5	2	2	11 02	Dibayarkan makan dan minum rapat Kantor Satpol-PP untuk Bulan Mei 2009 Dibebankan pada Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		Rp 375.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	17	5	2	2	11 03	Dibayarkan makan dan minum tamu Kantor Satpol-PP untuk Bulan Mei 2009 Dibebankan pada Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman		Rp 487.500
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15 01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Sertijab camat di Kec Pangkalan pada tanggal 3 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp 795.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15 01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Patroli wilayah di Kec Harau pada tanggal 15 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp 530.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15 01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Penerbitan Usaha Play Station di Kec Guguk pada tanggal 5 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp 880.000
1-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15 01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi mengenal Penyakit Masyarakat di Kec Pangkalan pada tanggal 26 dan 27 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp 690.000
PINDAHAN												Rp 241.853.956	Rp 135.221.334	

													Halaman : 16			
DIPINDAHKAN													Rp	241.853.956	Rp	135.221.334
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Sosialisasi tentang teknik pencegahan dan pengambilan tindakan bagi siswa yang keluyuran pada jam sekolah di Kec Pangkalan pada tanggal 12 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Peresmian Irigasi di Kec Akabliuru pada tanggal 18 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	195.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Pencanangan Nagari Adat di Kec Mungka pada tanggal 10 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	200.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Pembukaan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional di Kec luhak pada tanggal 17 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	510.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Peresmian TK di Kec Bukit Barisan pada tanggal 20 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	750.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Pelaksanaan Hari ABSAR di Kec. Gunung Omeh pada tanggal 23 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	635.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Pelaksanaan Hari ABSAR di Kec. Kapur IX pada tanggal 13 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	965.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Peresmian Nagari Adat di Kec. Suliki pada tanggal 12 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	550.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Operasi Penertiban Siswa SMAN 1 harau di Kec. Harau pada tanggal 5 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	440.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala Daerah dalam rangka Pelaksanaan Hari ABSAR di Kec. Mungka pada tanggal 7 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	1.590.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Menghadiri rapat penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kec. Lareh Sago Halaban pada tanggal 11 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	620.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Persiapan penyuluhan dan sosialisasi terhadap siswa SLTP dan SLTA di Kec. Pangkalan pada tanggal 23 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	230.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Persiapan penyuluhan dan sosialisasi terhadap siswa SLTP dan SLTA di Kec. Gn Omeh pada tanggal 25 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	405.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas Pengamanan Kepala daerah dalam rangka pelantikan Wali Nagari Simp Sugiran di Kec. Guguk pada tanggal 06 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	270.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka penyidikan pendirian tower PT Natrindo di Taram Kec Harau pada tanggal 31 Maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.		Rp	550.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02	Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi dalam persiapan penyuluhan dan sosialisasi terhadap SLTP dan SLTA se Kec.Bukit Barisan.Pada tanggal 27 Maret 2009.		Rp	220.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hanif,SH dalam rangka melakukan Survei tentang pendirian tower Telkom PT Solusindo Kreasi Pratama di Kec.Lareh Sago Halaban Pada tanggal 07 April 2009.		Rp	345.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Susi Hardini cs dalam rangka melakukan Persiapan Kegiatan penyuluhan terhadap kedisiplinan siswa dalam proses belajar ke Dinas Pendidikan Kab.Lima Pulu Kota.Pada tanggal 22 April 2009.		Rp	340.000
DIPINDAHKAN													Rp	241.853.956	Rp	144.326.334

														PINDAHAN		Rp		Rp	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hardiwan ,SP dalam rangka melakukan Persiapan Kegiatan penyuluhan terhadap kedisiplinan siswa dalam proses belajar di SLTPN 1 Kec.Suliki.Pada tanggal 25 April 2009.		Rp	241.853.956	Rp	144.326.334
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hardiwan ,SP dalam rangka melakukan Persiapan Kegiatan penyuluhan terhadap kedisiplinan siswa dalam proses belajar di SLTPN 2 Kec.Suliki.Pada tanggal 23 April 2009.			Rp	270.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Dra.Susi Hardini dalam rangka melakukan Survei tentang pendirian tower Sarana dan prasarana Telekomunikasi atas nama PT Sapta Aslen East di Guntuang Kec.Bukit Barisan. Pada tanggal 13 April 2009.			Rp	280.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya perjalanan dinas dalam rangka Koordinasi dan Konsultasi tentang Perda Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kab. Pasaman tanggal 24 - 25 maret 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			Rp	270.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya penggantian penginapan dan SPPD dalam rangka mengikuti rapat fasilitas peraturan perundang-undangan tentang Satpol-PP di Kab. Padang Pariaman pada tanggal 15-16 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			Rp	1.200.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya penggantian penginapan dan SPPD dalam rangka mengikuti rapat Forum Komunikasi Satpol-PP se-Sumbar ke 32 di Kab. Pasaman pada tanggal 11-12 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			Rp	475.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya penggantian penginapan dan SPPD dalam rangka Koordinasi dengan Satpol-PP Sumbar di Padang pada tanggal 20-21 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			Rp	1.275.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	01	18	5	2	2	15	02		Dibayarkan biaya penggantian penginapan dan SPPD dalam rangka Koordinasi dan konsultasi tentang pelaksanaan MOU di Pol-PP Agam pada tanggal 2-3 Februari 2009 dibebankan pada rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.			Rp	1.675.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	01		Dibayarkan biaya service kendaraan Dinas Kepala Kantor Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			Rp	1.275.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	02		Dibayarkan biaya penggantian suku cadang kendaraan Dinas Kepala Kantor BA 41 C Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			Rp	297.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	02		Dibayarkan biaya pemeliharaan kendaraan dinas berupa pembelian tape beserta kelengkapannya kendaraan Dinas Kepala Kantor BA 41 C Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			Rp	85.470	
31-Mei-09														Dipungut/Dipotong - PPN - PPh Pasal 22		Rp	222.727	Rp	222.727
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	02		Dibayarkan biaya Pemeliharaan kendaraan Dinas BA 41 C dan Kendaraan patroli BA 8054 CQ Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		Rp	33.409	Rp	33.409
31-Mei-09														Dipungut/Dipotong - PPN - PPh Pasal 22				Rp	3.454.500
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	03		Dibayarkan biaya Pembelian BBM kendaraan Dinas Kepala Kantor BA 41 C Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		Rp	314.045	Rp	314.045
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	03		Dibayarkan biaya Pembelian BBM kendaraan Patroli BA 8054 CQ Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas		Rp	47.107	Rp	47.107
31-Mei-09	1	19	1	19	02	02	24	5	2	2	05	03		Dibayarkan biaya Pembelian BBM kendaraan Roda dua Bulan Mei 2009 dibebankan pada biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas			Rp	2.250.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	05	03	5	2	2	17	03		Pembayaran biaya perjalanan dinas,bantuan transportasi dan kontribusi a/n Hardiwan SP cs dalam mengikuti Diklat penyusunan kontrak barang dan jasa dan ujian sertifikasi Nasional di Padang.Pada tanggal 26 s/d 29 Mei 2009.Dibebankan Pada Biaya Bimbingan Teknis Implementasi.			Rp	2.250.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	05	03	5	2	2	17	03		Pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Hardiwan SP cs dalam mengikuti Diklat Orientasi Pemerintahan bagi aparatur pemerintahan di Padang.Pada tanggal 05 s/d 07 Mei 2009.Dibebankan Pada Biaya Bimbingan Teknis Implementasi.			Rp	13.400.000	
31-Mei-09	1	19	1	19	02	05	03	5	2	2	17	03		Dibayarkan bantuan biaya/Kontribusi Pelatihan Gabungan Dalmas kepada Polres Kota Payakumbuh a/n Zahari Amli S.Sos.Dibebankan pada biaya Bimbingan Teknis Implementasi.			Rp	400.000	
														DIPINDAHKAN		Rp	242.471.245	Rp	2.000.000
																		Rp	180.600.693

PINDAHAN													Rp	242.471.245	Rp	180.500.593
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	11	01	Dibayarkan makan dan minum anggota bulan Mei 2009 dibebankan pada kegiatan Penyediaan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan			
31-Mei-09															Rp	27.350.000
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	02	Dipungut/Dipotong -PPH Pasal 21			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	02	Dibayarkan biaya perjalanan dinas kepada M.Rifky S.STP cs dalam rangka mengikuti rapat koordinasi forum Pol-PP se Propinsi Sumbar dalam membahas evaluasi PAM Pemilu legislatif tahun 2009 pada tanggal 13 s/d 14 Mei 2009.Dibebankan pada biaya perjalanan dinas luar daerah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	02	Pembayaran biaya perjalanan dinas a/n Nasriyanto ST cs dalam rangka pelaporan dan evaluasi pengamanan pemilu legislatif tahun 2009 ke Departemen Dalam Negeri tanggal 26 s/d 29 April 2009.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Wilfrianto,SH cs dalam rangka melakukan koordinasi dan konsultasi pengamanan kampanye Pilpres langsung ke Kab.Padang Pariaman.Pada tanggal 08 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas kepada Rori Debeski cs dalam rangka Patroli wilayah pasca selesainya rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kec.Bukit Barisan pada tanggal 27 April 2009.Dibebankan pada Biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas kepada Budi Iskandar cs dalam rangka Patroli wilayah pasca selesainya rekapitulasi penghitungan suara di wilayah kec.Mungka pada tanggal 28 April 2009.Dibebankan pada Biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas kepada M.Rifky,S.STP cs dalam rangka Pembersihan atribut/baliho Partai Politik di Kec. Lareh Sago Halaban tanggal 08 April 2009 dibebankan pada Biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendalian keamanan lingkungan			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan Biaya perjalanan Dinas Melakukan Monitoring Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu Legislatif tahun 2009 pada tanggal 09 april 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Melakukan Pengamanan dan Monitoring Kegiatan Pemilu Legislatif di Kec.Harau pada tanggal 10 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Melakukan Pengamanan Pasca Pemilu Legislatif di Kantor KPU Kec.Harau pada tanggal 11 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Melakukan Pengamanan Penghitungan suara Pemilu Legislatif di Aula kantor Bupati Sarilamak Kec.Harau pada tanggal 15 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan Biaya Perjalanan Dinas Melakukan Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilu Legislatif di Aula kantor Bupati Sarilamak Kec.Harau pada tanggal 16 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Alfiandi cs dalam rangka melakukan Pengamanan Monitoring kegiatan kampanye partai politik di kec.Mungka pada tanggal 01 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Syukril Amri cs dalam rangka melakukan Pengamanan Penghitungan suara Pemilu Legislatif di Aula Kantor Bupati Sarilamak kec.Harau pada tanggal 21 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Yanto cs dalam rangka melakukan Apel Pergeseran Pemilu 2009 di Kec.Harau pada tanggal 07 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan lingkungan.			
DIPINDAHKAN													Rp	243.786.245	Rp	236.485.593

														PINDAHAN		Rp	243.786.245	Rp	236.485.593
76	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n M.Rifky cs dalam rangka melakukan Patroli wilayah dan monitoring pelaksanaan Kampanye Pemilu di Kec.Luak pada tanggal 03 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.					
7	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hardiwan cs dalam rangka melakukan Monitoring Kampanye Partai Politik di Kec.Bukit Bariswan pada tanggal 02 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.065.000	
8	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Alfiandi cs dalam rangka melakukan Monitoring Pelaksanaan Kampanye Partai Politik di Kec.Harau pada tanggal 06 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.475.000	
9	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n M.Rifky S.STP cs dalam rangka melakukan Monitoring Pelaksanaan Kampanye Partai Politik di Kec.Kapur IX pada tanggal 06 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.020.000	
0	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Syukril Amri cs dalam rangka melakukan Monitoring Pelaksanaan Kampanye Partai Politik di Harau pada tanggal 04 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.185.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n M.Rifky.S.STP cs dalam rangka Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan suara di Aula Kantor Bupati Sarilamak Kec. Harau pada tanggal 04 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	985.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Syukril Amri cs dalam rangka Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan suara di Aula Kantor Bupati Sarilamak Kec. Harau pada tanggal 18 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	715.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hanif,SH cs dalam rangka Pengamanan Rekapitulasi Penghitungan suara di Aula Kantor Bupati Sarilamak Kec. Harau pada tanggal 17 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.125.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Syukril Amri cs dalam rangka Patroli Wilayah pasca Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec.Akabiluru pada tanggal 26 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	655.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Hanif,SH cs dalam rangka Patroli Wilayah pasca Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec.Payakumbuh pada tanggal 25 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.040.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Rori Debeski cs dalam rangka Patroli Wilayah pasca Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec.Guguak pada tanggal 24 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.095.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Aprilmen cs dalam rangka Patroli Wilayah pasca Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec.Situjuh Limo Nagari pada tanggal 23 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.050.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Alfiandi cs dalam rangka Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan suara Hasil Pemilu di Aula Kantor Bupati pada tanggal 22 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	1.050.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Denny Suardi cs dalam rangka Penghitungan Rekapitulasi Penghitungan suara Hasil Pemilu di Aula Kantor Bupati pada tanggal 20 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	790.000	
	31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Rori Debeski cs dalam rangka Patroli Wilayah pasca Rekapitulasi Penghitungan suara di Kec.Payakumbuh pada tanggal 30 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			Rp	770.000	
																	Rp	360.000	
DIPINDAHKAN																Rp	243.786.245	Rp	250.865.593

PINDAHAN													Rp	243.786.245	Rp	250.865.593
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Dra.Susi Hardini cs dalam rangka melakukan Patroli wilayah dan kampanye monologis partai keadilan sejahtera di Kec.Luak.Pada tanggal 01 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			
31-Mei-09	1	19	1	19	02	15	05	5	2	2	15	01	Dibayarkan biaya perjalanan dinas a/n Dra.Susi Hardini cs dalam rangka melakukan Patroli wilayah dan kampanye partai peserta pemilu 2009 di Kec.Payakumbuh.Pada tanggal 03 April 2009.dibebankan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah kegiatan pengendali keamanan .lingkungan.			
Jumlah													Rp	243.786.245	Rp	220.000
Jumlah bulan / tanggal 31 Mei 2009													Rp	243.786.245	Rp	251.305.593
Jumlah sampai bulan lalu 30 April 2009													Rp	243.786.245	Rp	261.305.593
Jumlah semua s/d bulan / tanggal 31 Mei 2009														1.006.517.059		987.945.014
Saldo Buku														1.250.303.304		1.239.250.607
Setoran Ke Kas Daerah s/d Bulan Lalu																11.052.697
Setoran Ke Kas Daerah Bulan Ini																-
Setoran Ke Kas Daerah s/d Bulan Ini																-
Saldo Buku Bersih																11.052.697

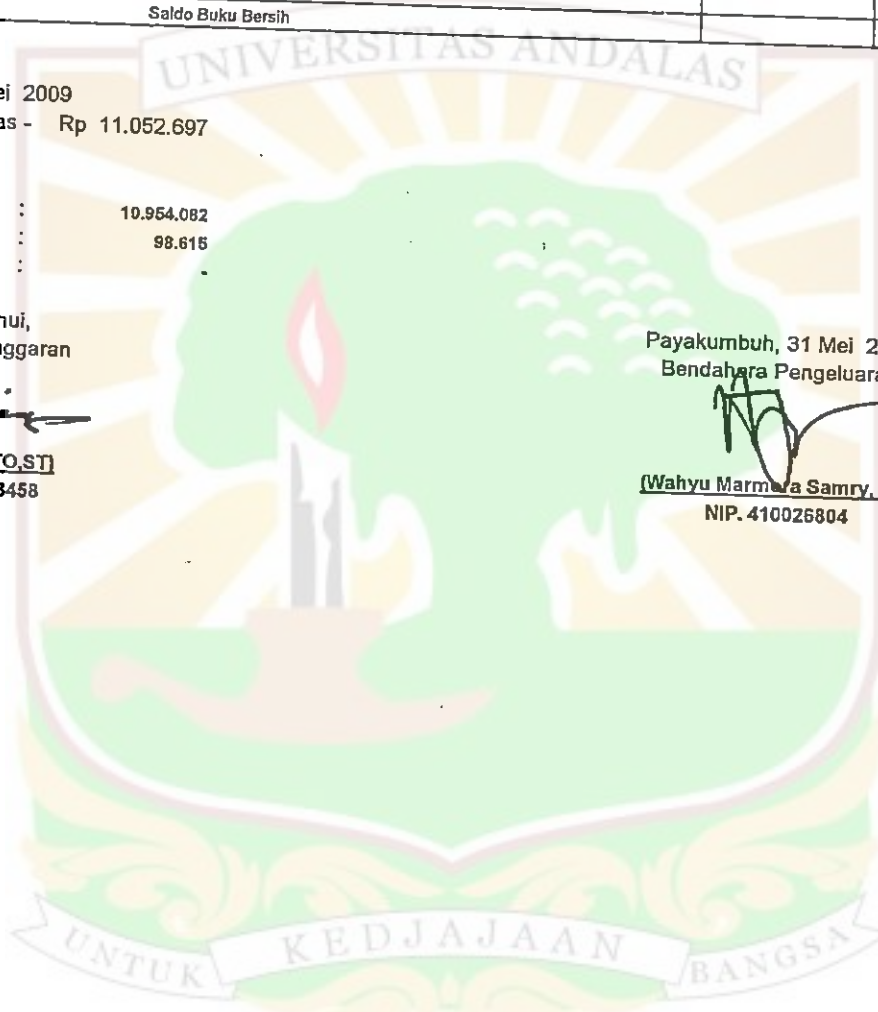
hari ini tanggal 31 Mei 2009
ami didapat dalam kas - Rp 11.052.697

dari :
ai : 10.954.082
do bank : 98.615
at berharga :

KABUPATEN
SATUAN
ANGGARAN
Mengetahui,
guna Anggaran
WASRIYANTO, ST
NIP. 160033458

Payakumbuh, 31 Mei 2009
Bendahara Pengeluaran

(Wahyu Marmara Samry, SH)
NIP. 410026804



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BUKU PAJAK PPN/PPH

SKPD

Kepala SKPD

Bendahara Pengeluaran

Bulan

Tahun Anggaran

: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

: Nasriyanto, ST

: Wahyu Marmora Samry, SH

: Mei

: 2009

Halaman : 1

No Urut	Tanggal	Uraian	REF	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1	2	3		4	5	6
1	31-Mei-09	Pemungutan Pajak atas Pembayaran Honor Pegawai Penyedia Jasa Administrasi Keuangan Bulan Mei 2009. - PPh Pasal 21	Bku No.6	Rp 480.000	Rp 480.000	Nihil
2	31-Mei-09	Pemungutan Pajak atas Pembayaran Alat Tulis Kantor Bulan Mei 2009. - PPN - PPh Pasal 22	Bku No.9	Rp 96.182 Rp 14.427	Rp 96.182 Rp 14.427	Nihil
3	31-Mei-09	Pemungutan pajak Atas Pembelian tape dan kelengkapannya untuk Kendaraan BA 41 C Bulan Mei 2009 - PPN - PPh Pasal 22	Bku No.51	Rp 222.727 Rp 33.409	Rp 222.727 Rp 33.409	Nihil
4	31-Mei-09	Pemungutan pajak Atas Pemeliharaan kendaraan BA 41 C dan Kendaraan BA 8054 CQ Bulan April 2009. - PPN - PPh Pasal 22	Bku No.53	Rp 314.045 Rp 47.107	Rp 314.045 Rp 47.107	Nihil
5	31-Mei-09	Pemungutan Pajak atas Pembayaran Biaya Makan dan Minum Bulan Mei 2009. - PPh Pasal 21	Bku No.61	Rp 1.315.000	Rp 1.315.000	Nihil
		JUMLAH		Rp 2.522.898	Rp 2.522.898	NIHIL

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
 BENDAHARA PENGELUARAN
 NASRIYANTO, ST
 NIP. 160033458

Payakumbuh, 31 Mei 2009
 BENDAHARA PENGELUARAN

WAHYU MARMORA SAMRY, SH
 NIP. 410026804

